

**PERAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM RANAH
POLITIK DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DEVIN MURANIS ALFIANDI

NIM. 160801075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1442 H/2021 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Devin Muranis Alfiandi**

NIM : 160801075

Program Studi : Ilmu Politik

Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Devin Muranis Alfiandi
NIM. 160801075

**PERAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)
DALAM RANAH POLITIK DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

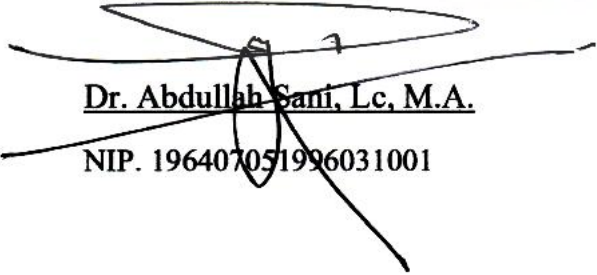
DEVIN MURANIS ALFIANDI

NIM. 160801075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Abdullah Sani, Lc, M.A.

NIP. 196407051996031001

Pembimbing II,

Aklima. S. fill. M.A

NIP. 198810062019032009

**PERAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM RANAH
POLITIK DI ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh:
Devin Muranis Alfiandi
NIM. 160801075

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
27 Rabiul Awwal 1442

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A.
NIP. 196407051996031001

Aklima. S.Fill. M.A
NIP.198810062019032009

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005

Melly Masni, M.I.R
NIP.1979305242020122016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Nama : Devin Muranis Alfiandi
NIM : 160801075
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
Judul : Peran Front Pembela Islam (FPI) dalam Ranah Politik di Aceh
Tanggal Sidang : 27 Juli 2021
Tebal Skripsi : 73 halaman
Pembimbing I : Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A
Pembimbing II : Aklima, S.Fill. MA

Front Pembela Islam (FPI) adalah ormas Islam berjuang memperjuangkan ideologinya dengan cara amar makruf-nahi munkar. Ideologi ormas ini diterima relatif mudah di Tanah Rencong karena beberapa faktor, salah satunya adalah karena pendiri utama FPI Habib Rizieq Syihab dikenal sebagai salah satu keturunan Nabi Muhammad saw. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah ideologi yang diperjuangkan oleh FPI dalam ranah politik di Aceh dan bagaimanakah peran FPI dalam memperjuangkan ideologi tersebut dalam ranah politik di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan beberapa responden. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ideologi yang diperjuangkan oleh FPI dalam ranah politik di Aceh dan untuk mengetahui peran FPI dalam memperjuangkan ideologi tersebut dalam ranah politik di Aceh. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa ideologi yang diperjuangkan FPI dalam ranah politik di Aceh secara umum tidak ada perbedaan dengan pemahaman *mainstream* masyarakat Aceh terutama menyangkut aliran yang dianut FPI serta tujuan FPI dibentuk, yakni penegakan syariat Islam secara *kaffah* yang diperjuangkan secara konstitusional. FPI menanamkan ideologi kepada masyarakat Aceh melalui berbagai cara, di antaranya memperjuangkan kepentingan masyarakat terutama menyangkut advokasi nilai-nilai syariat dan hal-hal lain yang dianggap sebagai bentuk keistimewaan dan kekhususan Aceh. FPI memiliki pengaruh besar di Aceh dan didukung ulama-ulama dayah, bahkan tidak sedikit pimpinan dayah adalah fungsionaris FPI dan beberapa pengurus inti FPI lainnya merupakan akademisi (dosen) dan pengusaha besar di Aceh. Peran FPI di Aceh cukup signifikan, baik terlibat dalam politik praktis seperti menjadi anggota legislatif maupun menjadi tim sukses pada kontestasi-kontestasi pemilu dan pilkada. Apabila terjadi bencana, ormas FPI berada di garda terdepan mengumpulkan (menggalang) bantuan dan menyalurkannya kepada yang berhak.

Kata kunci: *Peran, Front Pembela Islam, Politik, Aceh.*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan *inayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya *shalawat* beriring salam penulis panjatkan kehadiran Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abdullah Sani, MA selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih turut pula penulis ucapkan kepada Ibu Aklima, S.Fil.I., MA selaku pembimbing II yang telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK.,MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S. Ag. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Politik dan selaku penasehat akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Ibuk Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku penasehat akademik (PA) dan seluruh dosen dan karyawan program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Negeri Islam Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A dan Aklima. S. Fill. M.A selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk selesainya skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag dan Ibu Melly Masni, M.I.R selaku dosen penguji I dan penguji II yang telah mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk selesainya skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
8. Teristimewa sekali penulis persembahkan skripsi ini kepada ayahanda tercinta - Muchlis meskipun telah tiada dan Ibunda tercinta Rahmawati yang selalu memberikan dukungan, dorongan, serta doa siang-malam, sehingga saya mampu menjadi pribadi seperti saat ini. Terimakasih banyak juga kepada

keluarga-keluarga saya lainnya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.

9. Terimakasih kepada teman-teman saya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu Raja Arzul Maita Malik, dan teman-teman lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat serta doa untuk saya.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyempurnaan skripsi ini.

Tanpa adanya mereka, penulis tidak yakin penelitian ini dapat selesai dengan baik. Peneliti berterima kasih dengan sepenuh hati, semoga Allah swt selalu melindungi mereka serta membalas kebaikan mereka. Namun demikian, peneliti bertanggung jawab penuh atas segala kekurangan dalam penulisan ini, kritik yang membangun sangat peneliti harapkan.

Banda Aceh, 27 Juli 2021
Penulis,

Devin Muranis Alfiandi
NIM. 160801075

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. <i>Literature Riview</i>	7
BAB II MENGENAL FRONT PEMBELA ISLAM	
2.1. Sejarah Lahir FPI	12
2.2. Visi-Misi FPI	13
2.3. Bentuk Kegiatan FPI	14
2.4. Ideologi FPI	16
2.5. Cara Rekrutmen Anggota FPI	18
2.6. Konsep Agama dan Negara dalam Pandangan FPI	19
2.7. FPI Dibubarkan	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian	24
3.3 Lokasi Penelitian	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.5 Informan Penelitian	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Sejarah Lahir FPI di Aceh	29
4.2 Ideologi FPI dan Pertumbuhannya di Aceh.	33
4.3 Ideologi yang diperjuangkan FPI dalam Ranah Politik di Aceh	36
4.4 Peran FPI dalam Memperjuangkan Ideologinya dalam Ranah Politik di Aceh	54
4.5 Tantangan dan Peluang Politik FPI di Aceh	64

BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 68
5.2 Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN FOTO-FOTO



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : SK Bimbingan
- Lampiran 4 : Profil Informan
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.6. Latar Belakang Masalah

Front Pembela Islam (FPI) adalah salah satu organisasi massa yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 oleh para *habaib* dan ulama di Pondok Pesantren Al-Umm Ciputat Tangerang Selatan Provinsi Banten. Keberadaan FPI di Indonesia merupakan manifestasi daripada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 22E ayat (3), “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Lebih lanjut mengenai ketentuan regulasi baik yang bersifat teknis, petunjuk, dan operasional diatur di dalam Undang-Undang Ormas. Pada saat pendirian FPI pertama kali masih menggunakan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Artinya bahwa keberadaan FPI terdaftar secara resmi di Departemen Dalam Negeri dan memiliki legalitas serta berbadan hukum.

Latar belakang berdiri FPI adalah karena merajelanya kemaksiatan dan kezaliman yang dilakukan secara terang-terangan dan tersistem. Dengan merajalelanya kemaksiatan, maka bencana akan datang. Lebih lanjut dikatakan oleh Pendiri FPI Dr. Muhammad Habib Rizieq Syihab, Lc., MA sebagai berikut:

“Latar belakang pendirian FPI adalah merajalelanya kezhaliman dan maraknya kemaksiatan di tengah masyarakat. Yang oleh karenanya telah terjadi kerusakan di mana-mana, bahkan telah mengundang berbagai musibah di seantero negeri. Sehingga tidak bisa tidak harus ada dari bagian umat ini yang sudi tampil ke depan untuk melawan kezhaliman dan memerangi segala kemunkaran, dengan segala resiko perjuangannya, agar terhindar dari segala malapetaka yang bisa menghancurkan negeri dengan segala isinya. Untuk itu Front Pembela Islam lahir.”¹

Secara umum visi-misi FPI adalah menegakkan amar makruf nahi mungkar secara *kaffah* di segenap sektor kehidupan.² Mengenai visi-misi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab menjelaskan:

“Sesuai dengan latar belakang pendiriannya, maka FPI mempunyai sudut pandang yang menjadi kerangka berfikir organisasi (visi), bahwa penegakan amar makruf nahi munkar adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezaliman dan kemungkaran. Tanpa penegakan amar makruf nahi munkar, mustahil kezaliman dan kemungkaran akan sirna dari kehidupan umat manusia di dunia. FPI bermaksud menegakkan amar makruf nahi munkar secara *kaffah* di segenap sektor kehidupan, dengan tujuan menciptakan umat shalihah yang hidup dalam *baldah thayyibah* dengan limpahan keberkahan dan kerizaaan Allah ‘*Azza wajalla*. Insyaa Allah. Inilah misi FPI. Jadi visi-misi FPI adalah penegakan amar makruf nahi munkar untuk penerapan syari’at Islam secara *kaffah*.”³

Selanjutnya, organisasi FPI berpegang kepada aqidah *Ahlussunnah wal Jama’ah* dan dalam pengamalannya mengikuti kepada Mazhab Imam Syafi’i dengan aqidah Imam Asy’Ariyah dan Maturidiyah. Moto perjuangan FPI adalah “*Haq* tanpa sistem dikalahkan batil dengan sistem.” Lebih lanjut dijelaskan, FPI memiliki semboyan “Hidup mulia atau mati syahid.”

¹ Muhammad Habib Rizieq Syihab, *Dialog FPI Amar Makruf Nahi Munkar: Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Maksiat di Indonesia*, Cet.ke-2, (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2008), hlm. 127.

² Al-Habib Muhammad Rizieq, *Ibid.*, hlm. 142.

³ Habib Rizieq Syihab, *Ibid.*, hlm. 142.

Kemudian filsafat perjuangan FPI adalah “Bagi mujahid, difitnah itu biasa, dibunuh berarti syahid, dipenjara berarti *'uzlah*, dan diusir berarti tamasya.”⁴

Di tingkat provinsi, FPI pertama kali terbentuk di Jakarta dilanjutkan di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, dan lain-lain. Hingga pertengahan tahun 2018 FPI baru terbentuk di 27 Provinsi. Untuk Provinsi Aceh FPI masuk tidak lama setelah gempa dan tsunami menghantam Aceh. Namun baru resmi berdiri pada 28 November 2008.⁵ FPI sangat cepat berkembang di Aceh, bahkan anggotanya sudah mencapai hampir 60 ribu orang. Secara nasional lebih dari 2 juta anggota.⁶

Sejak berdiri di Aceh tahun 2008, FPI sudah terbentuk di 21 kabupaten/kota kecuali Simeuleu, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues.⁷ Eksistensi dan peran FPI di Aceh cukup besar. Hal ini terlihat di setiap aksi yang berkaitan dengan syariat Islam, bencana alam, dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya terlihat di mana-mana anggota FPI dengan seragam putihnya di *traffic light* mengumpulkan donasi. Di Aceh FPI mendapat dukungan besar dari para ulama, cendikiawan, mantan kombatan GAM, aktivitis, dan berbagai pihak lainnya. Bahkan beberapa tokoh FPI pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Kapolri dan Kapolresta Banda Aceh. Pada periode pertama kepemimpinan FPI di Aceh, beberapa kali pemerintah Aceh, bahkan

⁴ *Ibid.*, hlm. 160-165.

⁵ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Mengenal Front Pembela Islam: Sejarah, Tujuan, dan Gerakan (Analisis Perspektif Pancasila, UUD 1945, dan Teori Hukum)*, Banda Aceh, Pena, 2018, hlm. 30.

⁶ Wawancara dengan Bapak Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi (Pendiri FPI Aceh) tanggal 21 September 2020.

⁷ *Ibid.*

institusi TNI-Polri bekerjasama dengan FPI melakukan Sosialisasi Damai ke seluruh Aceh pada bulan Ramadan.⁸

Animo masyarakat Aceh mendukung dan bergabung dengan FPI cukup besar, bahkan Koalisi Ormas Islam Aceh yang terdiri dari lebih 30 ormas besar dan OKP Islam mempercayai Ketua DPW FPI Kota Banda Aceh Teungku Zainuddin Ubit sebagai ketuanya, bahkan Panglima Aswaja Aceh juga dari kalangan FPI, Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Teungku Bulqaini juga sudah dua periode menjadi pengurus inti FPI Aceh.⁹

Pada kesempatan lain terlihat, di mana pada tahun 2016 Pendiri sekaligus Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab memberi ceramah di Lampulo Banda Aceh, tidak kurang sekitar 30 ribu masyarakat berbondong-bondong menghadari ceramahnya, bahkan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakilota Banda Aceh serta cukup banyak tokoh Aceh pun ikut hadir.¹⁰ Pada sisi lain, gerakan dakwah FPI mendapatkan tantangan besar terutama dari penguasa saat ini, bahkan hampir semua media massa memberitakan sisi negatif FPI, yaitu sebagai ormas radikal, dan sebagainya. Tetapi faktanya, stigmatisasi tersebut tidak menyurut masyarakat Aceh terutama pemuda dan pemudinya ikut bergabung dan mendukung FPI.

Dukungan besar untuk FPI datang dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, mahasiswa, kalangan ulama dayah dan santrinya, aktivis, mantan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

kombatan GAM, pimpinan LSM, advokat, bahkan akademisi pun menjadi pengurus FPI di Aceh.¹¹ Pada pemilu 2019 silam, tidak sedikit calon legislatif meminta dukungan suara kepada FPI, bahkan beberapa orang di antaranya kader FPI menjadi anggota legislatif di beberapa kabupaten/kota. Di Aceh Utara berhasil menjadi anggota DPRK dari berbagai partai ada tiga orang, di Pidie ada dua orang, Kota Lhokseumawe satu orang, Aceh Timur dua orang, Aceh Tengah satu orang, Aceh Jaya 1 orang, dan Aceh Besar 1 orang, bahkan Wakil Bupati Aceh Besar, Waled Husaini sebelumnya adalah Ketua Dewan Pengawas FPI Aceh. Untuk DPD (Dewan Perwakilan Daerah), FPI Aceh berhasil membawa satu kadernya duduk di Senayan sebagai senator mewakili Aceh.¹²

Sebagai organisasi massa, FPI memiliki perang yang cukup signifikan di dalam negeri bahkan hingga ke luar negeri, seperti Palestina, Rohingya, dan lain-lain terutama dalam misi kemanusiaan. Di dalam negeri seperti di Aceh misalnya terlibat cukup aktif ketika bencana gempa dan tsunami meluluhlantakkan Aceh pada 26 Desember 2004. Pasca- gempa dan tsunami Aceh, akhirnya FPI secara resmi membuka cabangnya di Provinsi paling ujung Pulau Sumatra ini. Sejak berdiri secara resmi pada tahun 2008, tidak sedikit peran FPI dalam berbagai hal di Aceh termasuk dalam ranah perpolitikan Aceh.

¹¹ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Mengenal Front Pembela Islam.....Op.Cit.*, hlm. 48-53.

¹² Wawancara dengan Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi pada tanggal 9 April 2021.

Semakin massif dan membesarnya FPI di Aceh merupakan satu hal yang menarik untuk dikaji terutama terkait perannya di Aceh, maka oleh karena itu penulis tertarik meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Peran Front Pembela Islam (FPI) dalam Ranah Politik di Aceh”.

1.7. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ideologi yang diperjuangkan oleh FPI dalam ranah politik di Aceh ?
2. Bagaimanakah peran FPI dalam memperjuangkan ideologi tersebut dalam ranah politik di Aceh ?

1.8. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi ideologi yang diperjuangkan oleh FPI dalam ranah politik di Aceh.
2. Untuk mengetahui peran FPI dalam memperjuangkan ideologi tersebut dalam ranah politik di Aceh.

1.9. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini ditujukan ke dalam beberapa *interest* sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa agar mereka lebih memahami mengenai ideologi FPI.
2. Untuk akademisi agar dapat memahami ideologi FPI dalam politik lokal di Aceh.
3. Untuk para pengamat agar menjadi referensi dalam menjawab persoalan terkait ideologi FPI.

1.10. Literature Review

Dalam penelitian ini ada beberapa kutipan referensi terdahulu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, di antaranya sebagai berikut:

Ponco Wibowo dengan judul: “Politik dan Dakwah dalam Pandangan Fungsionaris DPW FPI Kota Bandar Lampung”. Kesimpulan skripsi tersebut adalah bahwa politik adalah suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan suatu tujuan sedangkan dakwah ialah menyampaikan kebenaran ajaran agama untuk membangun tatanan kehidupan yang penuh kedamaian dan jauh dari kemungkaran serta berusaha menatap ke depan yang lebih baik. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, politik sebagai media dakwah dan menjadi sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan sesungguhnya sedangkan dakwah artinya usaha atau aktivitas dengan lisan atau tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan menaati Allah swt. Jadi dakwah dan politik adalah dua hal yang bisa saling memberikan simbiosis mutualisme atau saling bersinergi. Karena dengan menggunakan kekuatan politik maka tujuan dakwah akan lebih cepat terealisasi. Itulah alasan kenapa FPI hadir di Indonesia, tidak lain untuk menguasai panggung politik agar lebih mudah untuk berdakwah,

menyampaikan risalah Tuhan tanpa gangguan dan hambatan.¹³ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut mengurai mengenai politik dan dakwah, di mana disimpulkan bahwa dakwah dan politik harus sejalan dan bersinergi. Politik bukan tujuan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari dakwah. Tidak ada dikotonomi antara politik dan dakwah. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa bagi FPI di Aceh, politik dan agama harus menyatu. Keduanya tidak bisa dipisahkan, dianalogikan seperti tanaman dan pagar.

Ari Febriansyah Ismail dengan judul: “Konstruksi Gerakan Front Pembela Islam di Kota Makasar”. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi lintas organisasi keagamaan dan lintas partai yang lahir pasca orde baru yang menganut paham *Ahlu Sunnah Wal Jama’ah* dan berideologi Islam atau Islamisme, di mana FPI mempertautkan secara langsung hubungan Islam dengan negara atau politik serta memperjuangkan cita-cita politik Islam. Front Pembela Islam sendiri memiliki prinsip perjuangan *amar ma’ruf nahi mungkar* untuk penerapan syariat Islam secara *kaffah*.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian ini hanya pada tujuan FPI secara umum, sementara dalam penelitian ini membahas mengenai ideologi dan perannya di Aceh. Persamaannya adalah bahwa FPI adalah ormas

¹³ Ponco Wibowo, Skripsi dengan judul: “Politik dan Dakwah dalam Pandangan Fungsionaris DPW FPI Kota Bandar Lampung”, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Pemikiran Politik Islam, (Riau: Universitas Raden Intan, 2017), hlm. 89.

¹⁴ Ari Febriansyah Ismail, Skripsi dengan judul: “Konstruksi Gerakan Front Pembela Islam di Kota Makasar”, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik (Makasar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2016), hlm. 77.

yang tidak menafikan politik dalam agama dan merupakan ormas berideologi ahlussunnah wal jamaah.

Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyri dengan judul: “Mengenal Front Pembela Islam: Sejarah, Tujuan, dan Gerakan: (Analisis Perspektif Pancasila, UUD 1945, dan Teori Hukum)”. Kesimpulan buku tersebut adalah bahwa keberadaan FPI adalah bahwa keberadaan FPI tidak bertentangan dengan konstitusi dan norma serta regulasi apapun yang ada di NKRI, bahkan sebaliknya untuk menjaga, memperkuat hal tersebut.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah bahwa keberadaan FPI sudah sesuai dengan cita-cita konstitusi Indonesia. Sementara dalam penelitian dibahas mengenai peran FPI di Aceh. Persamaannya antara lain bahwa ideologi FPI di Aceh secara umum tidak ada perbedaan dengan pemahaman masyarakat Aceh, bahkan dukungan masyarakat Aceh terhadap FPI karena ideologinya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau ideologi negara dan falsafah bangsa.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Riza Adi Putra tahun 2020 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pandangan FPI terhadap Islam Nusantara”. Hasil penelitian kualitatif skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pada dasarnya menurut FPI Islam Nusantara sudah baik, namun perlu dirubah beberapa bagian tertentu yang terdapat penyimpangan dengan Islam, seperti masalah jilbab yang harus disesuaikan dengan fatwa ulama

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyri, *Mengenal Front Pembela Islam: Sejarah, Tujuan, dan Gerakan: (Analisis Perspektif Pancasila, UUD 1945, dan Teori Hukum)*, (Banda Aceh, Pena, 2018), hlm. 169.

temporer¹⁶. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai isu kajian. Penelitian di atas mengkaji mengenai pandangan FPI tentang Islam Nusantara yang digagas oleh NU. Persamaannya adalah mengenai tujuan pendirian FPI.

Penelitian yang relevan lainnya adalah dilakukan oleh Acep Suryanto, mahasiswa UPI Bandung tahun 2017 yang berjudul “Eksistensi Organisasi Keagamaan FPI (Front Pembela Islam) dalam Upaya Pengendalian Penyimpangan Sosial di Masyarakat”. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa upaya pengendalian penyimpangan sosial oleh FPI Cikarang Utara adalah dilakukan dengan cara dakwah dan hisbah. Pengendalian sosial dalam bentuk dakwah ini lebih bersifat pengendalian persuasif, yakni dengan cara memberikan pemahaman dan nilai-nilai agama terhadap masyarakat untuk menjaga diri agar tidak terjerumus dalam setiap bentuk penyimpangan dan mengajak masyarakat sama-sama peduli terhadap lingkungan sosial agar terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan sosial. Pengendalian sosial dalam bentuk dakwah ini dilakukan oleh FPI Cikarang Utara dengan menyelenggarakan pengajian, tabligh akbar, dan melakukan sosialisasi terkait adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pepariwisata yang berisi pelarangan kegiatan usaha diskotik, bar, klub malam, pub, panti pijat, live musik, dan jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama. Sementara kegiatan pengendalian sosial yang dilakukan dalam bentuk hisbah ini lebih bersifat

¹⁶ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream>, diakses tanggal 3 Agustus 2021.

pengendalian koersif, kegiatan pengendalian koersif yakni dalam bentuk monitoring atau kontroling serta melakukan razia tempat-tempat kemaksiatan atau penyimpangan social bersama-sama pihak kepolisian.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu meneliti mengenai ideologi FPI dan perannya di Aceh, sedangkan penelitian di atas meneliti mengenai bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh FPI Cikarang Utara, Bekasi. Persamaannya adalah pada bentuk dakwah dan peran FPI dalam masyarakat.



¹⁷ <http://repository.upi.edu/29439/>, diakses tanggal 3 Agustus 2021.

BAB II

MENGENAL FRONT PEMBELA ISLAM

2.1. Sejarah Lahir FPI

Front Pembela Islam (FPI) atau dalam bahasa Arab dikenal *Aljabhah Addifa'iyatul Islamiyah* atau *Defender's Islamic Front* didirikan oleh para habaib, ulama dan aktivis Islam yang berpusat di Pondok Pesantren Al-Umm, Jakarta Selatan.

Ide awal pembentukan FPI muncul dari Habib Rizieq Syihab ketika beliau pulang belajar di Arab Saudi menuntut Ilmu di Universitas King Saud University-Riyadh. Sepulang dari sana ia melihat di Jakarta khususnya maksiat merajalela yang dilakukan secara terang-terangan, maka ia mengajak para tokoh-tokoh Islam yang seorientasi untuk mendirikan sebuah wadah penegakan amar makruf nahi mungkar yang kelak bernama FPI. Sebagai tokoh utama FPI, Habib Rizieq menyatakan, “Latar belakang pendirian FPI adalah merajalelanya kezaliman dan maraknya kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan di mana-mana, bahkan telah mengundang berbagai musibah di seantaro negeri. Sehingga tidak bisa tidak harus ada dari bagian umat ini yang sudi tampil ke depan untuk melawan kezhaliman dan memerangi segala kemunkaran, dengan segala resiko perjuangannya, agar terhindar dari segala malapetaka yang bisa

menghancurkan negeri dengan segala isinya. Untuk itu Front Pembela Islam lahir.”¹⁸

Salah satu dalil yang menjadi acuan utama dalam pembentukan FPI adalah firman Allah, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (*Q.S. Ali-Imran:104*).

Alasan lain FPI didirikan adalah: (1) adanya penderitaan panjang umat Islam Indonesia karena lemahnya control sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa; (2) adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajela di seluruh sektor kehidupan; (3) adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umatnya.¹⁹

2.2. Visi-Misi FPI

Visi-misi Front Pembela Islam (FPI) sebagaimana dijelaskan dalam buku Habib Rizieq Syihab adalah “Sesuai dengan latar belakang pendiriannya, maka FPI mempunyai sudut pandang yang menjadi kerangka berfikir organisasi (visi), bahwa penegakan amar makruf nahi munkar adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezaliman dan kemungkaran. Tanpa penegakan amar makruf nahi munkar, mustahil kezaliman dan kemungkaran akan sirna dari kehidupan

¹⁸ Muhammad Habib Rizieq Syihab, *Dialog FPI Amar Makruf Nahi Munkar: Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Maksiat di Indonesia*, Cet.ke-2, (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2008), hlm. 127.

¹⁹ Muhammad Habib Rizieq Syihab, *Ibid.*, hlm. 633.

umat manusia di dunia. FPI bermaksud menegakkan amar makruf nahi munkar secara kaffah di segenap sektor kehidupan, dengan tujuan menciptakan umat shalihah yang hidup dalam *balдах thayyibah* dengan limpahan keberkahan dan kerizaan Allah *'Azza wajalla*. Insya Allah. Inilah misi FPI. Jadi visi-misi FPI adalah penegakan amar makruf nahi munkar untuk penerapan syari'at Islam secara kaffah.²⁰

Untuk mewujudkan visi-misi di atas banyak hal sudah dilakukan FPI, mulai persoalan kecil hingga yang besar. Tidak kasus pelanggaran syariat telah diadvokasi oleh FPI sejak pendiriannya. Kasus yang masih segar diingatan kita misalnya advokasi penodaan agama yang dilakukan Ahok (Basuki Purnama) tahun 2016. FPI juga berhasil memperjuangkan di Mahkamah Agung (MA) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Minuman Keras agar dapat dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan UU Kesehatan (UU No.26 Tahun 2009) dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.²¹

2.3. Bentuk Kegiatan FPI

Sejak pendiriannya, FPI telah melakukan banyak kegiatan, di antaranya membantu evakuasi puluhan ribu korban tsunami Aceh tahun 2005. Bahkan Habib Rizieq sendiri bersama istri dan ribuan anggota FPI berada di Aceh selama empat bulan. Habib Rizieq langsung memimpin evakuasi mayat di

²⁰ Habib Rizieq Syihab, *Ibid.*, hlm. 142.

²¹ Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, *Mengenal Front Pembela Islam.....Op.Cit.*, hlm. 16.

sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar. Posko FPI pada saat itu berada di Komplek Kuburan Makam Pahlawan Banda Aceh. Dari sanalah tiap pagi hari laskar FPI bergerak mencari korban-korban tsunami. Selain evakuasi, kegiatan lain FPI di Aceh adalah membantu logistik korban tsunami yang terdapat di barak-barak pengungsian.²²

Bentuk lain kegiatan FPI selain konsen dalam bentuk kegiatan kemanusiaan yang membantu korban bencana alam di seluruh Indonesia juga membantu membantu kebutuhan warga Palestina akibat gempuran zionis Israel. FPI juga membantu logistik etnis Rohingya baik di Aceh, Sumatera Utara hingga menyampaikan langsung bantuan ke pengungsi Rohingnya di Bangladesh. Pada awal pendiriannya FPI bahkan terlibat langsung dalam melawan paramiliter salibis di Poso (Ambon) membela umat Islam yang dibantai di sana.²³

FPI juga melakuka bentuk kegiatan dakwah, baik dakwah *bilhal* (aksi nyata, lebih-lebh dakwah *bilqaul* (ceramah). Rata-rata pengurus FPI adalah para mubalig dan aktivis dakwah yang konsen dengan amar makruf dan nahi munkar. FPI juga akan senantiasa membela setiap orang yang dizalimi oleh negara, cara ini dilakukan dengan menyediakan pengacara untuk membela orang-orang yang ditintas dan dihukum oleh negara secara sewenang-wenang. Singkatnya adalah FPI siap terjun dalam berbagai bentuk kegiatan mulai yang

²² Wawancara dengan Bapak Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyi pada tanggal 2 Desember 2020.

²³ Wawancara dengan Bapak Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyi pada tanggal 2 Desember 2020.

paling soft hingga esktrim, seperti pengiriman sukarelawan jihad membantu umat Islam di seluruh dunia.²⁴

2.4. Ideologi FPI

Organisasi FPI berpegang kepada aqidah *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Sunni) dan dalam pengamalannya mengikuti kepada Mazhab Imam Syafi'i dengan aqidah Imam Asy'Ariyah dan Maturidiyah. Istilah *Ahlussunnah wal Jama'ah* merupakan gabungan dari kata *ahl as-sunnah* dan *ahl al-jama'ah*. Dalam bahasa Arab, kata *ahl* berarti "pemeluk aliran/ mazhab" (*ashab al-mazhabi*), jika kata tersebut dikaitkan dengan aliran/madzhab. Kata *al-Sunah* sendiri di samping mempunyai arti *al-hadits*, juga berarti "perilaku", baik terpuji maupun tercela. Kata ini berasal dari kata *sannan* yang artinya "jalan".²⁵ Secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud ahlu sunnah wal jama'ah menurut Hasyim Asy'ari adalah suatu paham yang mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dalam teologi mengikuti salah satu empat madzhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dan mengikuti Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi dalam tasawuf.²⁶

Moto perjuangan FPI adalah "*Haq* tanpa sistem dikalahkan batil dengan sistem." Lebih lanjut dijelaskan, FPI memiliki semboyan "Hidup mulia atau mati syahid." Kemudian filsafat perjuangan FPI adalah "Bagi mujahid, difitnah

²⁴ Wawancara dengan Bapak Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi pada tanggal 2 Desember 2020.

²⁵ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 9

²⁶ Nawawi, *Ilmu Kalam: dari Teosentris Menuju Antroposentris*, (Malang: Genius Media, 2014), hlm.85.

itu biasa, dibunuh berarti syahid, dipenjara berarti 'uzlah, dan diusir berarti tamasya.²⁷

Organisasi FPI memiliki beberapa doktrin, yaitu: (1) mengiklaskan niat, (2) memulai dari diri sendiri, (3) kebenaran harus ditegakkan, (4) setiap orang pasti mati, artinya berjuang demi Islam juga mati dan tidak berjuang samasekali juga akan mati, dan (5) mujahid di atas para musuhnya. Setiap anggota FPI wajib memiliki karakteristik khusus, seperti berani dan tegas, semangat dan militan, sabar dan tabah, mandiri dan independen, substansial formalistis, kompromis dialogis, dan tradisional moderat.²⁸

Front Pembela Islam memiliki bendera, logo, dan berbagai atribut lainnya. Makna setiap lambang dan bendera FPI memiliki makna masing-masing sebagai berikut:

- a. Warna dasar putih bendera menunjukkan kesucian;
- b. Bintang timbul melambangkan ketinggian Islam;
- c. Warna hijau pada bintang melambangkan keislaman;
- d. Tulisan Arab *Al-Jabhah Ad-Dafa'iyatul Islamiyah* menunjukkan semangat Qur'ani;
- e. Tulisan Front Pembela Islam berbahasa Indonesia menunjukkan rasa kebangsaan;
- f. Warna hitam pada tulisan melambangkan ketajaman pemikiran dan ketegasan sikap serta keberanian mengambil keputusan;
- g. Tasbih melambangkan zikrullah dan religiusitas;
- h. Bentuk tasbih segitiga sama sisi yang diikat melambangkan kekuatan tali persaudaraan;
- i. Sembilan puluh sembilan biji tasbih melambangkan asmaul husna yang 99;

²⁷ *Ibid.*, hlm. 160-165.

²⁸ Habib Rizieq Syihab, *Dialog FPI ...*, hlm. 215-229.

- j. Tiga puluh tiga biji tasbih di setiap sisi melambangkan keadilan, persamaan dan pemerataan;
- k. Warna hijau muda pada tasbih melambangkan kesejukan Islam; dan
- l. Tiga biji tasbih pemisah dengan bentuk kubah masjid melambangkan keterikatan anggota dengan masjid.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi FPI adalah memperjuangkan tegaknya sistem Islam dalam semua sektor kehidupan secara konstitusi dengan jalan amar makruf dan nahi mungkar. Bagi anggota dan pengurus FPI harus menjadi contoh dalam masyarakat dalam memperjuangkan ideologi tersebut.

2.5. Cara Rekrutmen Anggota FPI

Saat ini anggota FPI di seluruh Indonesia diperkirakan lebih dari dua juta orang dari berbagai profesi. Hanya ada tiga golongan yang tidak bisa menjadi anggota FPI, yaitu TNI-Polri aktif dan non-Muslim. Selain itu, semua anggota masyarakat dapat menjadi bagian keluarga besar FPI. Untuk menjadi anggota FPI, setidaknya harus memiliki 10 kualifikasi, sebagai berikut:

1. beragama Islam;
2. berakhlakul karimah;
3. takwa dan istikamah;
4. memilik ruhul jihad;
5. berani dan tegas;
6. mempunyai wawasan keilmuan (keislaman) yang memadai;
7. mempunyai loyalitas yang tinggi;
8. bersedia mematuhi AD/ART serta ketentuan-ketentuan dan peraturan peraturan-peraturan organisasi;
9. bersedia melaksanakan Asasi Perjuangan Front dan Garis-garis Besar Haluan Front (GBHF); dan
10. mengisi formulir anggota.³⁰

²⁹ Habib Rizieq Syihab, *Dialog FPI ...*, hlm. 230-231.

³⁰ Muhammad Habib Rizieq Syihab, *Op.Cit.*, hal, 603.

Syarat-syarat di atas adalah untuk menjadi anggota biasa di keanggotaan FPI yang harus melalui seleksi ketat dan wajib mengikuti jenjang pengkaderan atau pelatihan, namun untuk menjadi anggota kehormatan dari lintas tokoh bangsa, ada syarat khusus yang harus dimiliki dan dipenuhi, yaitu telah berjasa terhadap perjuangan Islam.³¹

Sejak tahun 2015 untuk menjadi anggota biasa di FPI harus melalui rekomendasi anggota atau pengurus FPI lain. Hal ini untuk mengantisipasi penyusupan (infiltrasi) oleh musuh-musuh Islam untuk merusak FPI dari dalam. Ada dua cara dilakukan FPI untuk merekrut anggota baru, pertama dengan cara menempelkan pengumuman di tempat-tempat umum, kedua melalui rekomendasi anggota atau pengurus FPI. Bagi yang ingin mendaftar menjadi anggota FPI bukan melalui rekomendasi, disyaratkan juga mendapatkan rekomendasi salah satu anggota atau pengurus FPI aktif.³²

2.6 Konsep Agama dan Negara dalam Pandangan FPI

Salah satu perjuangan misi perjuangan bahkan termasuk ke dalam ideologi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kaffah. Kaffah bermakna penerapan syariat atau hukum Islam dalam semua sendi kehidupan, bukan hanya dalam masalah ibadah *mahdhah* saja, melainkan juga di dalam ibadah *ghairu mahdhah*. Ibadah mahdhah adalah praktik peribadan yang menjadi esensi Islam termasuk di dalamnya rukun-rukun Islam, seperti salat, puasa, berhaji, dan

³¹ Muhammad Habib Rizieq Syihab, *Ibid.*, hal, 603.

³² Wawancara dengan Bapak Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi pada tanggal 2 Desember 2020.

sebagainya. Contoh ibadah yang tergolong *ghairu mahdhah* cakupannya cukup luas seperti semua kegiatan atau praktik kehidupan yang secara langsung tidak berkaitan dengan ibadah khusus, seperti terjun dalam dunia politik atau mengelola negara.³³

Bagi FPI agama dan negara tidak bisa dipisahkan, keduanya seperti mata koin. Dalam hal ini FPI menganut konsep Imam Al-Ghazaly dan Ibnu Taimiyah mengenai persoalan agama dan negara (politik). Secara umum pemikiran dua tokoh besar Islam ini agama dan negara atau politik tidak dipisahkan. Agama tanpa negara ibarat tanaman yang tidak dipagari. Apabila tanaman tidak dipagari, maka ia akan habis dimakan binatang, begitu juga dengan agama, apabila negara tidak hadir menjaganya, maka agama akan binasa (hancur bahkan bisa hilang).

“Konsep agama dan negara atau *addin wal daulah* versi FPI sama dengan pemikiran Imam Al-Ghazaly dan Ibnu Taimiyah, tidak bisa dipisahkan. Keduanya bagaikan ikan dan air atau pagar dengan tanamannya. Jika tidak dijaga atau dipagari, maka agama akan sirna. Contoh sudah banyak, seperti di Spanyol, Kamboja (Kerajaan Champa), Kerajaan Manila di Pilipina, dan lain-lain.”³⁴

Mengenai konsep pemerintahan yang diinginkan FPI, secara umum tidak ada perbedaan dengan sistem khilafah. FPI setuju sistem pemerintahan Islam berbentuk

³³ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 1 Agustus 2021.

³⁴ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 1 Agustus 2021.

khilafah diterapkan kembali di muka bumi ini. Bagi FPI sistem ini merupakan pilihan terbaik dari seluruh sistem yang pernah ada.

“Sistem khilafah itu sesuai dengan manhaj politik FPI. FPI sangat setuju sistem ini diterapkan kembali. Pada dasarnya FPI tidak sependapat dengan sistem demokrasi yang mengorbankan para intelektual. Maksudnya coba lihat dalam alam demokrasi suara ulama atau intelektual sekelas professor sama harganya, *one man one vote*, satu orang satu suara. FPI sangat menghargai intelektualitas seseorang. Maka oleh karenanya FPI sangat mendukung agar dunia ini kelak kembali ke sistem khilafah.”³⁵

2.7 FPI dibubarkan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa FPI berdiri sejak tahun 1998. Kegiatan FPI sejak berdiri sudah menuai protes oleh sebagian pengusaha-pengusaha yang usaha mereka terganggu karena *sweeping* oleh FPI. FPI dikenal sebagai ormas yang kerap merazia lokasi-lokasi yang dijadikan maksiat terlebih pada bulan Ramadan. FPI juga dikenal sering mengkritik pemerintah sejak era Gusdur sampai Jokowi.pada era kekuasaan Jokowi, FPI terlibat lebih agresif menentang kebijakan rezim sehingga pimpinan utama FPI Habib Rizieq Syihab harus hijrah ke Arab Saudi pada 26 April 2017. Pada tanggal 9 November 2020 kembali pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan ideologinya. Kepulangan Habib Rizieq ke tanah air kondisi di Indonesia sedang terjadi pandemi, yaitu Covid-19 sehingga harus

³⁵ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 1 Agustus 2021.

mematuhi protokol kesehatan sebagaimana telah diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Sejak kedatangannya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tampak massa yang begitu banyak menyambut kedatangan idola mereka sehingga melanggar prokes dan UU No. 6 Tahun 2018. Demikian juga pada kegiatan Maulid Akbar dan pernikahan putrinya di markas FPI di Petamburan Jakarta, massa hadir tidak dapat dibendung cukup banyak. Hal ini juga dianggap oleh pemerintah telah melanggar prokes, dan Habib Rizieq Syihab membayar denda sampai Rp 50 juta. Kegiatan lain Habib Rizieq Syihab yang dianggap melanggar prokes adalah peresmian masjid pesantren miliknya di Mega Mendung Bogor, Jawa Barat. Demikian juga pada saat Habib Rizieq Syihab berobat ke Rumah Sakit Ummi Bogor, dianggap tidak menyapaikan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang sebenarnya. Dalam kasus terakhir ini ia dijatuhi vonis 4 tahun penjara.

Dari berbagai kegiatan tersebut, dan menganggap keberadaan FPI dan Habib Rizieq Syihab menjadi ancaman bagi pemerintah saat ini, maka secara resmi FPI dibubarkan melalui Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kapolri, BNPT, dan Menkopolkam, Mendagri, Menkumham, dan Menkoinfo Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 tahun 2020, Nomor 264 tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan

Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI yang yang diumumkan pada tanggal 30 Desember 2020.³⁶



³⁶ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/01/07511261/front-pembela-islam-dibubarkan-muncul-fpi-wajah-baru?page=all>, lihat juga: <https://kabar24.bisnis.com/read/20201230/15/1336916/fpi-dibubarkan-isi-lengkap-surat-keputusan-bersama-menteri-jaksa-agung-kapolri-dan-kepala-bnpt>, diakses tanggal 2 Agustus 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini kita akan menggunakan metode kualitatif, dimana metode ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri dalam masyarakat ataupun dengan melihat atau mengamati fenomena-fenomena yang telah ada dalam masyarakat itu sendiri atau terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Menurut Erickson, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.³⁷

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang “Peran Front Pembela Islam (FPI) dalam Ranah Politik di Aceh”. Peneliti akan fokus pada ideologi yang dimiliki FPI dikaitkan dengan politik lokal di Aceh.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat suatu penelitian ilmiah dilakukan serta hal-hal yang terkait dengan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di

³⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 7.

Provinsi Aceh, karena beberapa pengurus inti FPI Aceh tersebar di beberapa kabupaten/kota.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah jenis pengumpulan data yang diperoleh pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dimana penelitiannya adalah instrument kunci.³⁸

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi serta latar belakang dari pembahasan yang ingin diteliti.³⁹ Informan merupakan orang-orang yang memahami dan mengerti tentang objek penelitian. Informan-informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Yusuf Al-Qardhaw, MH, Pendiri dan Mantan Ketua Umum FPI Aceh;
2. Ahmad Tajuddin (Aby Lampisang), mantan Imam Daerah FPI Aceh;
3. Tgk. Hambalisyah, S.Pdi, mantan Ketua Umum FPI Singkil;
4. Bustamam Usman, MA; akademisi;
5. Abubakar, SE, mantan Ketua Umum FPI Kota Banda Aceh;
6. Tgk. Isramudi, mantan Ketua Umum FPI Kota Banda Aceh;

³⁸ Albi Anggito, *Op.Cit.*, hlm. 8.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, *Op.Cit.*, hlm. 85.

7. Tgk. Azhari, SHI, mantan Sekretaris FPI Pidie;
8. Tgk. Azwar Ramnur, MA. Mantan Sekretaris FPI Singkil;
9. Tgk. Teuku Raja Sadzali, ST., tokoh masyarakat Banda Aceh;
10. Cut Hamina, S.Pd, tokoh masyarakat Banda Aceh..

3.6. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen-dokumen elektronik, foto-foto, dan gambar yang dapat mendukung dalam hal proses penulisan.⁴⁰ Kor studi kepustakaan adalah berupa karya ilmiah yang ditulis oleh pakar-pakar dalam bidang masing-masing yang terkait dengan objek penelitian.

b) Wawancara langsung

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Selain itu juga, wawancara atau interview juga berarti tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti

⁴⁰ I Made Indra P dan Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 26.

⁴¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 57-58

melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan-pimpinan FPI Aceh dan beberapa pengamat dan tokoh masyarakat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, internet dan sebagainya.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data dan kemudian menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan kemudian temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.⁴²

Analisis data merupakan upaya seorang peneliti untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristiknya bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi sesuatu permasalahan yang sedang diteliti secara kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari berbagai sumber terutama pengurus dan tokoh-tokoh FPI Aceh kemudian diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Secara umum ada tiga langkah pengelolaan data dalam penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

⁴² Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 244.

Ada beberapa tahapan dalam menganalisa data dalam skripsi ini, yang dimulai dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dari beberapa sampel, kemudian di proses melalui rekaman, pencatatan, pengetikan, dan kemudian dianalisis, kemudian diambil suatu kesimpulan, tetap menggunakan menggunakan kata-kata yang dinarasikan ke dalam teks yang diperluas dan kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian.⁴³



⁴³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 100.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Lahir FPI di Aceh

Front Pembela Islam (FPI) secara nasional didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Umm Ciputat, Jakarta. Para pendiri FPI selain tokoh utamanya Habib Rizieq Syihab, terdapat banyak tokoh nasional terutama dari pimpinan pondok pesantren se-Jabodetabek. Berdasarkan AD/ART-nya, FPI merupakan ormas Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) dengan pengamalan aqidah atau ketauhidan kepada Abu Hasan Al-'Asy'ari dan Maturidi. Dalam hal fikih bermazhab kepada Imam Syafi'e, sementara dalam hal tasauf mengacu kepada pemikiran Imam Al-Ghazaly.⁴⁴

Menurut Tgk. Yusuf Al-Qardhawy,⁴⁵ Ahlussunnah wal Jama'ah berarti pemahaman dan pengamalan agama seperti ormas-ormas Islam lain di Indonesia, seperti NU, Mathla'ul Anwar, Al-Washliyah, HUDA, RTA, Tastaifi, Sirul Muhtadin, dan lain-lain.

⁴⁴ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Mengenal Front Pembela Islam,Op.Cit.*, hal. 7.

⁴⁵ Yusuf Al-Qardhawy adalah pendiri pertama FPI Aceh. Beliau yang menerima mandat pertama kali pembentukan FPI Aceh oleh Habib Rizieq Syihab. Beliau saat ini merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur Sigli. Selain itu beliau sebagai salah satu Komisioner Bawaslu/Panwaslih Kota Banda Aceh. Beliau juga mengajar di beberapa kampus sebagai dosen luar biasa termasuk di UIN Ar-Raniry. Pada saat FPI didirikan tahun 2005 di Aceh, beliau masih berstatus mahasiswa semester V di Jurusan Politik Islam (Tata Negara Islam) atau SJS (*Syari'ah Jinayah wa Siyasaah*) Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Beliau angkatan 2003 dan selesai kuliah pada tahun 2010.

“FPI itu persis seperti amalan NU, Mathla’ul Anwar, Al-Washliyah, HUDA, RTA, Tastafi, Sirul Mubtadin, dan lain-lain. saya sendiri pernah menjadi wakil ketua di NU Aceh. Artinya kami juga melakukan samadiyah, maulidan, tahlil, dan lain-lain seperti yang diamalkan oleh ulama-ulama dayah di Aceh.”⁴⁶

FPI sampai saat ini telah berdiri di 29 provinsi di Indonesia termasuk di Aceh. FPI masuk atau berdiri di Aceh pada awal-awal bencana gempa dan tsunami. Menurut Tgk. Yusuf Al-Qardhway, FPI hadir di Negeri Serambi Mekkah sekitar seminggu setelah gempa dan tsunami, tetapi baru resmi terbentuk pada tahun 2008.

“FPI muncul di Aceh sekitar tujuh hari pasca-tsunami, mereka mengevakuasi mayat sampai satu tahun lamanya. Ketika Habib Rizieq Syihab yang merupakan Ketua Umum-nya pada saat itu balik ke Jakarta, saya diberi mandat untuk membentuk FPI di Aceh, sejak ada surat mandat itulah saya mencoba memperkenalkan dulu FPI ke tokoh-tokoh agama di Aceh terutama ulama dayah. Masanya cukup lama sampai tiga tahun, sehingga resmi berdiri pada tahun 2008. Pada saat itu puluhan pimpinan dayah dan tokoh agama termasuk aktivis mahasiswa hadir di dayah Tgk. Nasruddin Jeunieb. Hasil pertemuan itu mereka sepakat memilih saya untuk menjadi Ketua FPI Aceh pertama dengan masa pengabdian selama empat tahun.”⁴⁷

Pada awal FPI hadir di Aceh tidak mudah diterima oleh masyarakat karena dianggap FPI bentukan militer (Wiranto). Selain itu divonis memiliki hubungan dengan Al-Qaida dan kelompok Wahabi lainnya, namun setelah

⁴⁶ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 10 Juli 2021.

⁴⁷ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 5 Juni 2021.

dijelaskan oleh penerima mandat pertama, secara pelan-pelan masyarakat baru ikut bergabung dengan FPI.

“Berat sekali pada saat saya mendirikan FPI di Aceh, karena dituduh punya hubungan dengan Wiranto atau TNI, bahkan dianggap FPI dibentuk oleh Wiranto. Bahkan FPI juga dianggap bagian dari Wahabi dan Al-Qaida atau Syiah. Padahal itu fitnah besar agar FPI tidak diterima masyarakat Aceh.⁴⁸

Menurut Tgk. Yusuf Al-Qardhawy, untuk mendirikan FPI di Aceh membutuhkan kesabaran tinggi dan keikhlasan penuh. Pada saat FPI dibentuk menurutnya, hampir saja pendidikan yang sedang dijalani kandas di tengah jalan karena harus sering keliling Aceh memperkenalkan FPI kepada tokoh-tokoh agama terutama dari kalangan dayah.

“Saya hampir saja di DO di kampus karena udah semester 14 kuliah belum selesai. Ini terjadi karena saya sering keliling Aceh memperkenalkan FPI ke ulama dayah. Alhamdulillah walau waktunya sampai 3 tahun baru terbentuk secara resmi, banyak sekali pimpinan dayah, bahkan beberapa orang akademisi dari UIN dan Unsyiah ikut menjadi pengurusnya ketika saya jadi ketua pertamanya.”

Kemudian Tgk. Hambalisyah⁴⁹ mengakui bahwa kontribusi Tgk. Yusuf Al-Qardhawy sangat besar dalam memperkenalkan FPI kepada masyarakat Aceh termasuk salah satu dirinya.

⁴⁸ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 5 Juni 2021.

⁴⁹ Tgk. Hambalisyah adalah seorang pimpinan dayah di Aceh Singkil di daerah Lipat Kajang. Beliau adalah orang pertama kali yang menerima FPI di Aceh Singkil dari Tgk. Yusuf Al-Qardhawy tahun 2010. Selain itu beliau adalah seorang PNS (guru) di Singkil. Sampai saat ini (sebelum

“Saya kenal FPI melalui Tgk. Yusuf Qardhawy, beliau punya jasa besar mendirikan FPI di Aceh. Saya tau bagaimana sulitnya awal-awal mendirikan FPI termasuk di tempat saya di Singkil. Tapi akhirnya alhamdulillah diterima juga oleh masyarakat.”⁵⁰

Tgk. Yusuf Al-Qardhawy menambahkan bahwa beragam cara memperkenalkan FPI kepada masyarakat Aceh, di antaranya dengan mengadakan seminar atau diskusi publik. Dalam diskusi itu menghadirkan narasumber dari FPI Pusat (Jakarta). Dirnya juga bergabung menjadi bagian tim sukses ketika pesta demokrasi berlangsung sehingga memiliki akses dengan calon kepala atau dewan terpilih. Cara lain aktif ikut aksi bergabung dengan ormas-ormas atau OKP serta dengan BEM se-Kota Banda Aceh terutama menyangkut isu syariat Islam. Bahkan katanya, pernah hanya ia sendiri anggota FPI bersama atributnya bergabung dengan massa demonstran lainnya. Dengan cara inilah Tgk. Yusuf Al-Qardhawy memperkenalkan FPI kepada masyarakat Aceh sehingga sebelum dibubarkan anggota hampir mencapai 60 ribu di seluruh Aceh.

“Saya dulu memperkenalkan FPI ke masyarakat Aceh menggunakan banyak cara, seperti ikut aksi dengan ormas, okp, atau bahkan dengan organisasi kampus, seperti Presma UIN, Unsyiah, USM, dan lain-lain. Ada juga saya buat beberapa kali seminar atau diskusi publik, ada juga menjadi bagian tim pemenangan pemilu dan pilkada sehingga saya punya koneksi dengan orang-orang besar di Aceh. Dengan cara ini saya bisa perkenalkan FPI ke mereka, bahkan Irwandi Yusuf yang awalnya sangat anti dengan FPI, akhirnya mendukung penuh FPI. Habib Rizieq beberapa kali ke Aceh kami gunakan mobil Land Cruiser miliknya, bahkan disediakan bensin dan sopirnya. Pada saat

dibubarkan) beliau masih menjabat sebagai Ketua FPI Aceh Singkil. (Hasil wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy).

⁵⁰ Wawancara dengan Tgk. Hambalisyah tanggal 13 Juni 2021.

saya jadi ketua FPI Aceh sampai tahun 2012, anggotanya lebih 20 ribu orang, sekarang sebelum dibubarkan sudah mencapai 59 ribu lebih.”⁵¹

Tgk. Abubakar, mantan Ketua Umum pertama FPI Kota Banda Aceh menegaskan bahwa dirinya juga mengenal FPI melalui Tgk. Yusuf Qardhawiy.

“Pada saat itu kalau tidak salah tahun 2008, saya ikut mendaftar jihad awalnya ke Palestina melalui Tgk. Yusuf yang kala itu menjabat Ketua Umum FPI Aceh. Setelah selesai perkara jihad, saya tertarik bergabung dengan FPI karena mengenal Habib Rizieq sebagai sosok yang hebat dan cucu Nabi.”⁵²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa FPI berdiri di Aceh dibawakan langsung oleh Habib Rizieq Syihab pada saat terjadi gempa dan tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004. Tidak lama setelah tsunami, ribuan anggota FPI datang ke Aceh dalam rangka membantu evakuasi mayit. Selama FPI hadir di Aceh, para pemuda dan mahasiswa Aceh juga ikut bergabung mengevakuasi mayit. Tidak lama kemudian Ketua Umum FPI Pusat, Habib Rizieq Syihab memberikan mandat kepada Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy untuk mendirikan FPI di Aceh. Berdasarkan mandat tersebut, Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy mencoba membangun jaringan hingga keliling Aceh memperkenalkan FPI kepada ulama-ulama dayah. Dalam masa tiga tahun, FPI berhasil dibentuk secara resmi di salah satu dayah di Bireuen pada tahun 2008 yang dihadiri ratusan tokoh agama dan pimpinan dayah. Maka sejak saat itu FPI resmi berdiri di Aceh.

4.2 Ideologi FPI dan Pertumbuhannya di Aceh

⁵¹ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy pada tanggal 5 Juni 2021.

⁵² Wawancara dengan Tgk. Abubakar, SE pada tanggal 20 Juni 2021.

Istilah ideologi dipergunakan dalam arti yang bermacam-macam. Istilah ideologi adalah sebuah kata yang terdiri “*ideo*” dan “*logi*”. Kata “*ideo*” berasal dari bahasa Yunani yaitu *eidos*, dalam bahasa Latin *idea*, yang berarti “pengertian”, “ide” atau “gagasan”. Kata kerja dalam bahasa Yunani *oida* yang berarti mengetahui, melihat dengan budi. Jadi, secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi berarti “pengetahuan tentang ide-ide”, *science of ideas*.⁵³

Dalam dalam bahasa Arab, ideologi lebih makruf dengan istilah *mabda'*, secara etimologis *mabda'* adalah *mashdar mimi* dari kata *bada'a* (memulai), *yabda'u* (sedang memulai), *bad'an* (permulaan), dan *mabda'an* (titik permulaan). Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran (cabang).⁵⁴

Secara harfiah ideologi menurut Kaelan berarti ilmu pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham.⁵⁵ Ideologi (*mabda'*) adalah keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit.⁵⁶

⁵³ Gunawan Setiardi, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 17.

⁵⁴ Gunawan Setiardi, *Ibid.*, hal. 21.

⁵⁵ Ambiro Puji Asmaroini, “Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi”, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, Januari 2017E-ISSN 2527-7057, P-ISSN 2545-2683, hal. 54.

⁵⁶ Soerjanto Poespowardojo, *Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, dalam Alfian & Oetomo Oesman, eds, “Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), hal. 44.

Ideologi secara umum hanya tiga, yaitu kapitalis, sosialis, dan islamis. Hanya ideologi Islam yang bersumber dari wahyu, artinya ideologi yang diperjuangkan sesuai tatanan transendental (ilahiyah), bukan seperti ideologi kapitalis dan sosialis yang mengandalkan akal manusia.⁵⁷ Jika diamati seksama, maka terlihat bahwa ideologi FPI adalah sesuai *manhaj* Islam, yaitu memperjuangkan tegaknya sistem Islam sesuai konstitusi di Indonesia.

Gunawan Setiardja menambahkan bahwa ideologi mempunyai fungsi penting, yaitu menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu. Ideologi menjadi sumber inspirasi dan sumber cita-cita hidup bagi para warganya, khususnya para warganya yang masih muda. Ideologi berupa pedoman artinya menjadi pola dan norma hidup sekaligus menjadi ideal atau cita-cita. Realisasi dari ide-ide dipandang sebagai kebesaran, kemuliaan manusia. Dengan melaksanakan ideologi, manusia tidak hanya sekedar ingin melakukan apa yang disadari sebagai kewajiban. Manusia sanggup mengorbankan harta benda, bahkan hidupnya demi ideologi, karena ideologi menjadi pola, norma hidup dan dikejar pelaksanaannya sebagai cita-cita. Secara singkat dapat tegaskan bahwa ideologi menjadi bentuk hidup suatu kelompok atau seseorang.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi FPI adalah Islam Ahlunnah wal Jama'ah, artinya FPI berjuang dengan jalan amar makruf dan nahi mungkarnya untuk memperjuangkan sistem Islam di Indonesia

⁵⁷ Taqiyuddin An Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam* (terj), (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), hal. 39.

⁵⁸ Gunawan Setiardja, *Ibid.*, hal. 21.

secara konstitusional. Hal ini dapat diketahui dari alasan FPI didirikan, salah satunya adalah kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umatnya. Evidensi lainnya adalah menyangkut visi-misi FPI, doktrinnya, serta tujuan FPI didirikan.⁵⁹ FPI terus berupaya melalui amar makruf dan nahi munkar agar ideologinya menjadi suatu sistem legal di Republik ini.

Amar makruf nahi-munkar bukan hanya dipandang penting, tetapi ia dapat menyelamatkan bangsa dan negara. Pendiri sekaligus Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab menjelaskan bahwa nahi (*An-Nahyu*) secara bahasa bermakna melarang atau mencegah, menjauhkan, menghindarkan, menentang, mengancam, melawan, peringatan, teguran, dan sesuatu yang mencegah dikerjakan sesuatu.⁶⁰ Sementara *munkar* atau mungkar berarti perkara-perkara keji yang tidak diridhai Allah swt.⁶¹ Mungkar juga dapat berarti kejahatan atau maksiat. *Nahi* juga dapat berarti menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dan kita.⁶² Nahi mungkar dapat dimaknai adalah melarang setiap perbuatan, tindakan atau kebijakan yang merugikan umat manusia. Istilah amar makruf-nahi mungkar sinonim dengan *Al-Hisbah*.

4.3 Ideologi yang diperjuangkan FPI dalam Ranah Politik di Aceh

Ideologi dipandang penting bagi seseorang, kelompok orang, agama, etnis, dan suatu bangsa apalagi suatu organisasi yang memiliki massa banyak. Ideologi dapat

⁵⁹ Muhammad Habib Rizieq Syihab, *Op.Cit.*, hal. 633.

⁶⁰ Salman bin Fahd al-Audah, *Op.Cit.*, hal. 36.

⁶¹ Mahmud Yunus, *Op.Cit.*, hal. 468.

⁶² Khairul Umam, A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hal. 117.

berdasarkan pada agama, budaya, kepercayaan maupun dasar politik suatu kelompok. Urgensi ideologi ini karena dapat menentukan dan menjadi arah perjuangan mencapai cita-cita yang diinginkan. Oleh karenanya, suatu hal penting ideologi ini harus dimiliki.

Pendiri sekaligus Ketua Umum FPI Aceh pertama, Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy mengemukakan bahwa secara umum ideologi FPI untuk menegakkan hukum Islam dalam segala dimensi kehidupan di Indonesia dengan cara kontinu menegakkan amar makruf dan nahi munkar. Singkatnya bahwa ideologi FPI memperjuangkan sistem Islam secara konstitusi. Ditambahkan, “Hal ini dapat dilihat dari visi-misi FPI, bentuk dakwah atau kegiatan empirisnya serta doktrin yang dimiliki FPI. Keterlibatan FPI di seluruh Indonesia dalam kancah demokrasi pemilu, pilkada, dan pilpres sebagai evidensi yang sulit dibantahkan. Kami berpedoman kepada ideologi *ilahiyyah wan nubuwwah*”.⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara khusus ideologi FPI adalah sesuai tuntunan syariat, yaitu *ilahiyyah wan nubuwwah* (ketuhanan dan kenabian), yakni penerapan syariat Islam secara *kaffah* di persada bumi Indonesia dengan jalan amar makruf-nahi munkar. Jalan amar makruf dan nahi munkar strategi FPI untuk mencapai tujuan akhir tegaknya risalah Tuhan di bumi Indonesia ini.

“Tidak ada solusi akhir perjuangan FPI kecuali memperjuangkan tegaknya hukum Tuhan di Indonesia ini secara konstitusional. Tujuan akhir FPI dibentuk adalah untuk menegakkan hukum Allah di bumi persada ini. Hal ini sesuai dengan Sila Pertama dari Pancasila, artinya bahwa tidak ada larangan dalam konstitusi kita bila ada satu kelompok atau organisasi di Indonesia yang hendak

⁶³ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy pada tanggal 5 Juni 2021.

memperjuangkan syariat Islam masuk dalam sistem ketatanegaraan atau diperjuangkan secara konstitusional.”⁶⁴

Dalam ranah politik FPI akan selalu mendorong *decision maker* (penguasa atau pemerintah) untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan agar sesuai dengan Pancasila terutama Sila Pertama. Selain itu FPI akan terus berupaya agar Tujuh Kata yang telah dihapus di Sila Pertama dari Pancasila dikembalikan lagi.

“FPI sejak awal pendiriannya terus berjuang dengan dinamikanya agar Indonesia kelak mengakui dan memasukkan kembali Tujuh Kata dari Sila Pertama Pancasila kita. Ini dilakukan secara konstitusional, yakni sesuai aturan hukum di Indonesia.”⁶⁵

Sejak pendiriannya, tampak kegiatan FPI yang menimbulkan kontroversial terutama mereka yang terganggu dengan kepentingannya. Tidak seperti ormas-ormas lainnya, gerakan FPI lebih menonjol dalam hal aksi di lapangan menutup tempat-tempat yang diketahui melanggar syariat Islam, seperti perjudian, prostitusi, minuman keras, dan lain-lain. Apabila diperhatikan secara mendalam, ideologi FPI tidak ada bedanya dengannya tujuan umum NKRI.⁶⁶

Gerakan FPI di lapangan dalam terminologi Islam dikenal sebagai perbuatan nahi munkar. Menurut Tgk. Yusuf Al-Qardhawy, pendiri FPI Aceh mengatakan, “FPI lebih condong ke nahi mungkarnya daripada amar makruf. Gerakan amar makruf hampir tidak ada yang terganggu, bahkan menyenangkan, tapi nahi munkar jelas

⁶⁴ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 5 Juni 2021.

⁶⁵ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 1 Agustus 2021.

⁶⁶ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 5 Juni 2021.

berpotensi berhadapan dengan orang-orang atau kelompok yang tidak menginginkan kepentingannya terganggu termasuk penguasa.”⁶⁷

Aby Lampisang, mantan Imam Daerah FPI Aceh mengatakan bahwa gerakan politik FPI lebih mengutamakan nahi mungkar daripada amar makruf. Menurut mantan calon Gubernur Aceh periode 2012-2017 ini, penangkapan Habib Rizieq oleh penguasa saat ini karena terganggu dengan nahi mungkarnya FPI.

“Habib Rizieq ditangkap karena beliau memperjuangkan Islam khususnya dalam hal nahi mungkar. FPI lebih condong dalam nahi mungkar.”⁶⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan FPI yang paling menonjol adalah dalam hal nahi munkar. Nahi munkar menurut Quraish Syihab adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahi.⁶⁹ Salman Al-Audah mendefinisikan nahi munkar adalah sesuatu yang dibenci jiwa, tidak disukai dan dikenalnya serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar’i dan akal.⁷⁰

Menurut Tgk. Ahmad Tajuddin keberadaan FPI di Aceh lebih banyak pada nahi munkarnya dibandingkan dengan amar makruf. Beliau mengatakan, “*FPI leubeh aktif bak mencegah daripada nahi munkar,*” (FPI lebih aktif dalam mencegah nahi munkar).⁷¹

⁶⁷ Wawancara dengan Yusuf Al-Qardhawiy pada tanggal 5 Februari 2021.

⁶⁸ Wawancara dengan Aby Lampisang tanggal 25 Juni 2021.

⁶⁹ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keresasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hal. 175.

⁷⁰ Salman bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma’ruf Nahi Munkar* (terj: Ummu Udhma’ Azmi), (Solo: Pustaka Mantiq), tt, h. 13

⁷¹ Wawancara dengan Teungku Azwar pada tanggal 30 Juni 2021.

Tgk. Hambalisyah mengakui bahwa FPI adalah ormas Islam yang lebih memfokuskan diri pada penegakan nahi munkar. Bagi mahasiswa S2 UIN ini, hanya sedikit ormas yang berani menegakkan nahi munkar karena beresiko.

“FPI itu lebih fokus nahi munkar dibandingkan amar makruf, karena amar makruf semua orang pasti melakukannya, tidak untuk nahi munkar karena penuh resiko.⁷²

Hal senada diungkapkan oleh mantan Ketua Umum FPI Kota Banda Aceh, Tgk. Isramudi bahwa sejak ia mengenal FPI pertama kali tahun 2005, dan salah satu alasan ia bergabung dengan FPI karena ormas yang didirikan oleh Habib Rizieq Syihab itu karena nahi munkarnya. Bagi mantan kepala desa ini, hikmah nahi munkar cukup banyak, salah satunya adalah dapat menolak murka Tuhan.

“Saya suka dengan FPI karena belum pernah saya temukan ormas Islam yang mengedepankan nahi munkar kecuali FPI. Hikmah nahi munkar adalah kemurkaan Allah akan jauh.⁷³

Azwar, mantan Sekretaris DPW FPI Singkil mengungkapkan bahwa amar makruf dan nahi munkar yang dilakukan FPI di Aceh sebenarnya sudah lama ada, sebelum FPI hadir. Baginya ideologi FPI sejalan dengan tujuan NKRI, yakni sesuai konstitusi.

“Penerapan syariat Islam yang konstitusional. Dengan menegakkan syariat Islam itu secara konstitusi diakui oleh negara, bukan melawan negara, sejajar

⁷² Wawancara dengan Tgk. Hambalisyah pada tanggal 13 Juni 2021.

⁷³ Wawancara dengan Tgk. Isramudi pada tanggal 17 Juni 2021.

dengan negara, sebagai salah satu cita-cita bangsa, menegakkan syariat Islam. Bagi yang beragama Islam, penerapan syariat Islam itu bukan hanya hukum jinayah.”⁷⁴

Dalam konstitusi Indonesia, bahkan dalam peraturan perundang-undangan tidak diberikan wewenang menindak pelaku pelanggaran syariat oleh kelompok masyarakat. Hal ini bagian dari tugas kepolisian untuk melarang dan menindak setiap perbuatan yang termasuk penyakit masyarakat (pekat). Maka tidak mengherankan apabila tidak sedikit tindakan FPI mendapatkan penolakan dari masyarakat, bahkan berhadapan dengan aparat keamanan. Contoh kegiatan nahi munkar FPI yang berhadapan dengan aparat penegak hukum di Indonesia antara lain, tindakan penggrebekan lokasi maksiat di Kampung Kresek Pondol Gede, Jakarta pada 20 Mei 2006. Pada 28 Agustus 2011 ratusan anggota FPI merusak mobil Daihatsu Luxio di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Mobil tersebut diduga milik seorang penjual minuman keras. Di Matraman Raya, Cempaka Putih.⁷⁵ Tindakan lain FPI di Aceh misalnya penutupan lokasi maksiat di Rancung Lhokseumawe pada tahun 2015, penangkapan PSK di salah satu ruko di Jalan Soekarno-Hatta kawasan Lampenurut, Aceh Besar tahun 2018, pembubaran praktik perjudian di Ketapang tahun 2018, dan lain-lain.⁷⁶ Beberapa anggota FPI juga ditangkap polisi karena menegur orang-orang yang tidak berbusana sesuai tuntunan syariat di Kota Banda Aceh pada bulan Januari

⁷⁴ Wawancara dengan Teungku Azwar pada tanggal 23 Juni 2021.

⁷⁵ <https://nasional.tempo.co/read/383964/rentetan-aksi-fpi-dari-masa-ke-masa/full&view=ok>, diakses tanggal 12 Juni 2021.

⁷⁶ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy tanggal 5 Juni 2021.

2017. Mantan Ketua Umum FPI Aceh periode 2007-2012, Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy menyebutkan, “Pada saat laskar FPI ditangkap oleh polisi dari Polresta Banda Aceh pada malam Minggu sekitar bulan Januari 2017, saya ikut mengadvokasi membebaskan laskar FPI yang ditangkap itu.”⁷⁷

Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy menambahkan, kasus penangkapan di atas akibat konsisten dengan nahi munkarnya bukan hanya terjadi satu kasus, tetapi sudah beberapa kasus yang ditanganinya.

“Ada beberapa kasus yang saya tangani laskar-laskar FPI ditangkap oleh polisi karena menegakkan amar makruf-nahi munkar. Ada di Ketapang Aceh Besar karena melarang orang main judi, ada juga ditangkap karena mengkritik lembaga kepolisian yang sering berlaku refresif kepada pendemo terutama pada aksi *Omnibus Law*, dan berbagai aksi lainnya termasuk memprotes hasil suara pileg tahun 2019. Penangkapan pada acara HKTNI di Stadion Lhoongraya karena memprotes acara musik yang tidak dihentikan pada saat Azan Asar sedang berlangsung, dan lain-lain.”⁷⁸

Mengenai persoalan amar makruf dan nahi munkar meskipun ada perbedaan pandangan mengenai hukumnya, bagi FPI yang paling penting ada *real action* dalam penegakannya supaya tidak terjadi maksiat di bumi Tuhan. Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy mengatakan, “Bagi kami yang penting amar makruf dan anhi munkar harus tetap jalan kendati ada pro-kontra hukumnya, karena ini penting demi menjaga agama kita agar maksiat tidak ada.”⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy tanggal 5 Juni 2021.

⁷⁸ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy tanggal 5 Juni 2021.

⁷⁹ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy tanggal 5 Juni 2021.

Berbeda dalam pandangan juris Islam mengenai amar makruh dan nahi munkar. Sebagian mengatakan ia termasuk *fardhu kifayah* dan *fardhu ain*. Perbedaan pendapat tersebut terjadi dalam menafsirkan firman Allah Surah Ali Imran ayat 104.

وَأَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-Imran: 104).

Satu istilah yang terkandung dalam ayat di atas yang menjadi perbedaan penafsiran adalah menyangkut *minkum* (di antara kalian). Sebagian ulama mengartikan “*minkum*” (di antara kamu) pada ayat tersebut dengan makna seluruhnya, bukan sebagian umat Islam. Pendapat kedua menjelaskan, maksud “*minkum*” pada ayat tersebut adalah sebagian umat Islam, baik sendiri maupun secara kolektif (berjamaah atau organisasi).⁸⁰

Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau, “Tafsir Munir” menyatakan bahwa amar makruh nahi munkar termasuk *fardhu kifayah*. Tugas ini tidak boleh dilakukan sembarangan orang kecuali yang memahami betul keadaan masyarakat dan dilakukan dengan penuh siasat agar tidak menimbulkan mungkar baru atau masalahnya semakin parah.⁸¹ Pendapat senada disampaikan oleh Imam Al-Mawardi yang menyimpulkan bahwa kewajiban amar makruh-nahi munkar (*hisbah*) merupakan

⁸⁰ Tgk. Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Mengenal Front Pembela Islam.....*, Op.Cit, hal. 56-57.

⁸¹ Syaikh An-Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Munir*, Cet-2, Jilid-II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hal. 59.

fardhu kifayah kecuali yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.⁸² Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa tidak disyaratkan harus memberitahukan pemerintah (penguasa) ketika hendak melakukan amar makruf-nahi munkar karena tugas tersebut sebenarnya kewajiban seluruh umat Islam yang memiliki kualifikasi tertentu.⁸³

Sejak muncul di Aceh pada awal tahun 2005 silam, FPI telah banyak berkiprah dalam segala bidang, baik sebagai relawan kemanusiaan, membantu korban bencana alam, membangun rumah korban gempa di Aceh Tengah dan Pidie Jaya, dan yang *concern* dilakukan FPI di Aceh adalah advokasi mengenai isu-isu syariat Islam.

Menurut Tgk. Yusuf Al-Qardhawy, perjuangan penegakan syariat Islam di Aceh tidak terlalu sulit dibandingkan di luar Aceh. Hal ini karena Aceh telah memiliki payung hukum baik Qanun Jinayah maupun qanun-qanun lainnya.

“Dengan adanya amanah UUD 1945 khususnya Pasal 18A dan 18B dan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh serta UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta diperkuat secara teknis-aplikatif oleh qanun-qanun syariat, maka penerapan dan perjuangan syariat Islam di Aceh memiliki dasar hukum yuridis normatif yang tidak dapat dinafikan.”⁸⁴

Keberadaan FPI di Aceh mendapatkan dukungan luas masyarakat termasuk ulama dayah, hal ini karena elit-elit FPI umumnya berasal dari kalangan dayah/pesantren, bahkan tidak sedikit mantan kombatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) juga bergabung dengan FPI, mereka antara lain: Tgk. Ilyas Puteh, Tgk. Teuku Raja Sadzali, dan lain-lain. Hal lain karena akidah aplikatif FPI sesuai dengan

⁸² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, (terj-Fadli Bahri), cet-2, (Bekasi: Darul Falah, 2006), hal. 398.

⁸³ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Mengenal Front Pembela Islam.....*, *Op.Cit*, hal. 63.

⁸⁴ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy tanggal 5 Juni 2021.

kepercayaan dan amalan ulama-ulama *mainstream* Aceh. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa FPI beraqidah ahlussunnah wal jama'ah. Faktor penguat lainnya FPI semakin besar di Aceh karena pendiri FPI, yaitu Habib Rizieq Syihab merupakan keturunan Nabi Muhammad saw. Masyarakat Aceh sangat menghormati orang-orang yang memiliki nasab dengan Rasulullah saw.

Akademisi UIN Ar-Raniry, Bustamam Usman, MA menyatakan salah satu alasan banyak orang Aceh mendukung FPI karena ormas tersebut didirikan oleh *dzurriyat* Rasulullah, yaitu Habib Rizieq Syihab. Kandidat doktor ini sudah mengenal FPI sejak lama yaitu pada awal pendiriannya, bahkan lebih dikenal lagi ketika bencana alam gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 silam.

“FPI sudah kita kenal kiprahnya dalam masyarakat membawa misi dakwah, sangat luar biasa ketika terjadi banjir dan musibah. Di Aceh sekitar tahun 2004 ketika Habib Rizieq datang ke Aceh membantu korban tsunami sangat luar biasa dalam pandangan orang Aceh.”⁸⁵

Menurut mantan Imam DPD FPI Aceh, Tgk Tajuddin atau yang lebih populer dengan Aby Lampisang menyatakan bahwa FPI adalah ormas penyelamat Islam di Nusantara sehingga mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat.

“Karena FPI nyan penyelamat Islam, maka lon dari bagian ureueng Islam, akrena penyelamat islam wajib ta dukung.” (Karena FPI itu penyelamat Islam,

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Bustamam Usman, MA pada tanggal 29 Juni 2021.

maka saya dari bagian orang Islam, karena penyelamat Islam wajib kita dukung.”⁸⁶

Alasan lain rakyat Aceh mendukung secara massif gerakan dakwah FPI menurut Aby Lampisang adalah karena ormas tersebut dengan orang Aceh ibarat zat dengan sifat (ikan dengan air) sebagai organisasi pembela (penyelamat) Islam, maka ketika ia hadir di Aceh sudah sepantasnya harus didukung.

*“Karena lagee zat ngon sifeuet, jika dikatakan Aceh Islam, FPI penyelamat Islam kapah that, cocok, chiet nyan buet ih.”*⁸⁷

Mantan Panglima Muda GAM Wilayah Peureulak, Tgk. Raja Sadzali atau yang lebih dikenal dengan Teungku Raja mengungkapkan bahwa alasan ia bersimpati kepada FPI adalah karena ormas tersebut sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh yang ingin menerapkan hukum Islam.

“Secara pribadi, saya bersimpati dengan FPI itu terpanggil karena merasa diri saya itu terlahir dari orang Islam, sedangkan tersebut FPI Front Pembela Islam. Di saat agama kita diobok-obok, tidak ada hukum yang adil, disitulah kita bersatu memperjuangkan Islam, khususnya di Aceh bukan memberontak dengan negara.”⁸⁸

Tgk. Yusuf Al-Qardhawy menjelaskan bahwa selain karena faktor di atas, ia bergabung dengan FPI karena terpanggil oleh hati nurani dan kesamaan visi-misi serta ideologi dalam rangka penegakan hukum Islam secara kaffah.

⁸⁶ Wawancara dengan Tgk. Ahmad Tajuddin (Aby Lampisang) pada tanggal 30 Juni 2021.

⁸⁷ Wawancara dengan Tgk. Ahmad Tajuddin (Aby Lampisang) pada tanggal 30 Juni 2021.

⁸⁸ Wawancara dengan T. Raja Sadzaly, ST tanggal 1 Juni 2021.

“Saya dari dulu sejak awal berdiri FPI sudah tertarik kendati hanya mengenal FPI di media massa. Dengan adanya gempa dan tsunami di Aceh FPI masuk ke Aceh, dan pada saat itu saya sedang bekerja di NGO *Frence Red Cross* sebagai translator keluar dengan gaji besar demi bergabung dengan FPI di Banda Aceh. Saya suka dengan FPI karena itu tadi, yakni ingin menerapkan syariat Islam secara kaffah di NKRI ini.”⁸⁹

Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy menambahkan bahwa salah satu alasan lain banyak orang Aceh termasuk dirinya bergabung dengan FPI karena Ketua Umum FPI Pusat pada saat itu memiliki silsilah dengan Nabi Muhammad saw di generasi ke-39. Menurut Komisioner Bawaslu Kota Banda Aceh ini, selain karena alasan di atas, ia bergabung dengan FPI karena dinilai ormas yang sering divonis radikal itu akidahnya (aswaja) sama seperti yang dianut oleh mayoritas rakyat Aceh termasuk dirinya.

“Banyak faktor orang Aceh mendukung FPI, yang lebih kuat adalah karena Imam Besar FPI di Jakarta Muhammad Habib Rizieq Syihab adalah keturunan Nabi Muhammad saw dari generasi ke-29 dan akidahnya pun sama seperti yang dianut mayoritas rakyat Aceh.”⁹⁰

Salah satu pimpinan Pondok Pesantren di Aceh Singkil yang pernah menjadi Ketua Umum FPI Kabupaten Aceh Singkil, Tgk. Hambalisyah mengungkapkan alasan dirinya bergabung dengan FPI, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy di atas.

⁸⁹ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy tanggal 5 Juni 2021.

⁹⁰ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy tanggal 5 Juni 2021.

“Kami masyarakat Aceh apalagi ulama dayah sangat mencintai *dzurriyat* Nabi saw. Apabila ada *dzurriyat* Nabi di depan membela dan memperjuangkan agama, kami apalagi, sudah pasti wajib bersama beliau walau harus syahid.”⁹¹

Ungkapan senada disampaikan oleh Azhari, mantan Sekretaris FPI Pidie. Ia mengatakan bahwa ia tertarik dengan FPI sejak tahun 2013 silam ketika mengetahui Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab adalah keturunan Rasulullah saw. Lebih lanjut ditegaskan bahwa selain karena Habib Rizieq Syihab cucu Nabi saw, FPI secara terang-terangan ingin memperjuangkan hukum Islam di Indonesia.

“Kami rela mati di belakang cucu Nabi, apalagi Habib Rizieq jelas-jelas dengan tulus ikhlas memperjuangkan tegaknya syariat Allah di Indonesia. dan bukan saja saja, saya yakin sekali seluruh orang akan tertarik dengan FPI kalau mereka benar-benar tau Habib Rizieq adalah keturunan Nabi Muhammad saw.”⁹²

Lebih lanjutkan Azhari seorang aktivis yang pernah menjadi Ketua Umum Komite Mahasiswa Peduli Rakyat (KMPR) menyampaikan bahwa sejak awal mengenal FPI sekitar tahun 2008 sudah mencoba mempelajari tentang ormas Aswaja itu. Azhari mengenal betul FPI bahkan sistem-sistemnya pun secara jauh dikenalnya. Aktivis muda asal Pidie ini yang juga pernah menjabat Sekretaris DPW FPI Pidie pada periode awal mengungkapkan penilaiannya mengenai FPI. Baginya FPI ideologi FPI sesuai dengan syariat Islam.

⁹¹ Wawancara dengan Tgk. Hambalisyah pada tanggal 13 Juni 2021.

⁹² Wawancara dengan Azhari pada tanggal 14 Juni 2021..

“Saya udah kenal FPI sejak tahun 2008, tidak lama setelah tsunami Aceh. Saya betul mengenal sistem-sistem FPI gimana, sangat sesuai dengan syariat Islam.”⁹³

Tgk. Hambalisyah Sinaga, salah satu pimpinan pondok pesantren di Aceh Singkil menyebutkan bahwa FPI adalah ormas ‘paripurna’ yang siap sedia dan setia memperjuangkan amar makruf dan nahi munkar. Bagi tokoh Aceh Singkil ini, amar makruf dan nahi munkar versi FPI adalah tidak jauh beda seperti orang menanam padi yang diganggu hama terutama hama tikus. Ketua Umum Forum Umat Islam (FUI) Aceh Singkil ini yang masih menjabat pula Ketua Umum FPI Aceh Singkil ini secara tegas juga menguraikan panjang lebar eksistensi FPI yang didirikan oleh Habib Riziq Syihab ini. Tgk. Hambalisyah menganalogikan:

“FPI seperti orang yang membasmi tikus, harus ada yang menanam padi, memberi pupuk dan menyomprotkannya agar selamat dan panennya baik. FPI adalah yang membasmi tikus.”⁹⁴

Tgk. Raja Sadzali, mantan Panglima Muda GAM Wilayah Aceh Timur yang saat saat menjadi pengamat politik dan sosial di Aceh menyatakan bahwa ia mendukung FPI karena misinya atau ideologinya sesuai *manhaj* Islam dan jiwa yang ia miliki. Baginya FPI bukan hanya sekedar ormas yang gencar menyuarakan amar makruf dan nahi munkar, akan tetapi FPI menurut keturunan Cut Meutia ini adalah

⁹³ Wawancara dengan Azhari pada tanggal 14 Juni 2021.

⁹⁴ Wawancara dengan Tgk. Hambalisyah pada tanggal 13 Juni 2021.

ormas yang memiliki ideologi yang sama dengan orang Aceh sejak awal Kesultanan Aceh Darussalam didirikan.

“Walaupun FPI bukan didirikan di Aceh, dan pendirinya tidak ada satupun orang Aceh, tetapi ideologi FPI persis sama dengan visi-misi dan tujuan hidupnya orang Aceh secara umum, yaitu amar makruf nahi munkar. Bahkan FPI dengan berani saya katakan adalah orang yang akan memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah di Indonesia ini.”⁹⁵

Secara kultur, politik dan sosiologi, ada kesamaan orientasi antara FPI dan politik lokal yang menggema di Aceh. Aceh adalah sebuah wilayah pertama kali menjadi daerah masuknya Islam di Nusantara, bahkan di Asia Tenggara. Kemudian Aceh adalah salah satu provinsi dalam wilayah NKRI berhasil menerapkan syariat Islam dan terdapat banyak darah pejuang. Tgk. Yusuf Al-Qardhawy menjelaskan, “Antara FPI dan orang Aceh memiliki banyak kesamaan, di antaranya karena salah satu syarat menjadi anggota FPI adalah militan (berani). Alasan lainnya karena tujuan utama FPI adalah ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia secara konstitusional. Begitu juga dengan rakyat Aceh, sejak awal memberontak dengan Pusat melalui gerakan DI/TII tahun 1952 sesungguhnya hanya untuk tegaknya hukum Allah di bumi Aceh. Begitu juga ketika Hasan Tiro memproklamkan Aceh Merdeka pada tahun 1976.”⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Teuku Raja Sadzali pada tanggal 10 Juni 2021.

⁹⁶ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy tanggal 5 Juni 2021.

Menurut Aby Lampisang terdapat kesamaan antara perjuangan FPI dengan cita-cita rakyat Aceh. Bedanya menurut Aby Lampisang FPI bukan partai politik tetapi ia hanya sebagai ormas.

“Karena cita-cita masyarakat Aceh ingin mempayungi roda pemerintahan dengan sistem syariat. Sama ngon Gabthat dan GAM juga, FPI koen partai politik. FPI mendorong partai politik agar terciptanya keadilan ngon kemakmuran dan kejayaan.”⁹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa banyak kesamaan ideologi FPI dengan cita-cita orang Aceh. Orang Aceh ingin terus berjuang agar syariat Islam berlaku secara komprehensif bukan melalui partai politik, demikian juga dengan FPI yang memiliki orientasi agar di Indonesia dapat diterapkan syariat Islam dalam segala dimensi kehidupan. Bedanya, rakyat Aceh berjuang dalam skop Provinsi Aceh agar syariat Islam benar-benar diwujudkan, sementara FPI berjuang tegaknya sistem Islam untuk seluruh wilayah NKRI.

Masyarakat Aceh sejak dahulu merupakan bangsa pejuang, baik ketika menghadapi tentara Cina, Portugis, Belanda, dan Jepang, bahkan salah satu munculnya pemberontakan di Aceh melawan pemerintah pusat baik DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh maupun GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang dipimpin oleh Teungku

⁹⁷ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy tanggal 30 Juni 2021.

Muhammad Hasan Tiro faktornya adalah karena ingin menerapkan syariat Islam di Aceh.⁹⁸

Isu utama FPI adalah agar hukum Islam diterapkan di Indonesia secara konstitusional, maka oleh karena itu isu tersebut mengundang simpati masyarakat Aceh untuk mendukung FPI. Partai lokal Aceh khususnya PA (Partai Aceh) dan PDA (Partai Daerah Aceh) dikenal sebagai partai yang dekat dengan orang-orang FPI, bahkan Tgk. Muslim At-Thahiry kerap satu panggung dengan Ketua Umum PA, Muzakkir Manaf.

“Ketua FPI setelah saya yaitu Tgk. Muslim At-Thahiry adalah orang dekat Muallim, bahkan sering satu panggung dengan beliau.”⁹⁹

Wakil Ketua FPI Aceh Tgk. Abdul Wahid yang berasal dari Lhoknga Aceh Besar merupakan anggota PA, bahkan pada pemilu 2019 silam merupakan calon legislatif dari dapil-1 (Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang). Tgk. Abdul Wahid sebelum FPI dibubarkan oleh pemerintah terpilih sebagai Ketua Umum FPI Aceh periode 2020-2025.¹⁰⁰

Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy menegaskan bahwa secara kultural beberapa parlok di Aceh memiliki kesamaan visi-misi dalam melihat politik di Aceh.

“Secara kultural antara parlok-parlok di Aceh terutama PA dan PDA memiliki kesamaan dalam perjuangannya. FPI Aceh sangat dekat dengan mantan-mantan

⁹⁸ Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, MoU Helsinki RI-GAM menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional), (Banda Aceh: Bandar Publising, 2015), hal. 13-14.

⁹⁹ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy pada tanggal 15 Juni 2021.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy pada tanggal 15 Juni 2021.

kombatan, demikian juga dengan pimpinan-pimpinan dayah yang relatif banyak menjadi pengurus di PDA. Wakil Bupati Aceh Besar sebagai salah satu contoh, beliau adalah pengurus FPI sekaligus fungsionaris PDA.”¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedekatan FPI dengan partai lokal di Aceh terutama dengan PA dan PDA sebagai indikator keberhasilan FPI masuk dalam jaringan politik di Aceh untuk mempengaruhi elit-elit mantan kombatan dan pimpina dayah agar bersama-sama memperjuangkan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh. Ideologi FPI berhasil diterima dan masuk dalam kancah perpolitikan Aceh dan menjadi isu bersama yang akan diperjuangkan baik di parlemen *by system* maupun di luar parlemen.

Pada pemilu 2019 silam, beberapa daerah anggota FPI berhasil menjadi anggota legislatif melalui berbagai partai lokal terutama PA dan PDA (Partai Daulat Aceh), bahkan ada yang mencalonkan diri melalui partai nasional seperti Demokrat, dan lain-lain. Beberapa fungsionaris FPI menjadi pengurus partai lokal dan nasional. Di Pidie ada beberapa orang anggota legislatif adalah anggota FPI, demikian juga di Aceh Utara, Aceh Timur, dan di berbagai kabupaten/kota lainnya.¹⁰² Hal ini menunjukkan keberhasilan FPI memperjuangkan ideologi melalui sistem dan terus berupaya menjadi *pressure group* memperjuangkan syariat Islam agar menjadi paripurna ke depan.

¹⁰¹ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 1 Agustus 2021.

¹⁰² Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 5 Juni 2021.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, FPI telah berhasil menjadi bagian masyarakat Aceh karena kesamaan pandangan dan ideologi dalam memperjuangkan dan memperkuat syariat Islam di Aceh. *Kedua*, *grand issue* yang menjadikan FPI diterima oleh masyarakat Aceh adalah mengenai syariat Islam. *Ketiga*, Kelihaiian FPI menarik dukungan ulama, akademisi, pengusaha dan elit partai lokal di Aceh untuk memperjuangkan dan memperkuat isu-isu syariat Islam sehingga ideologi FPI menjadi ideologi bersama masyarakat Aceh. *Keempat*, ideologi FPI yang diperjuangkan dalam ranah politik di Aceh adalah memperkuat terimplementasinya syariat Islam secara kaffah. Selain itu, kehadiran FPI di Aceh sesuai dengan ‘*koor*’ keistimewaan Aceh sehingga memudahkan ideologinya diterima oleh masyarakat. Demikian juga dengan perjuangan politik lokal Aceh lainnya, seperti bendera Aceh, kekhususan Aceh, dan sebagainya, FPI secara terang-terangan mendukung hal tersebut baik disuarakan melalui press release ke media massa maupun bentuk aksi demonstrasi yang dilakukan.

4.4 Peran FPI dalam Memperjuangkan Ideologi dalam Ranah Politik di Aceh

Dalam pandangan FPI, amar makruf dan nahi munkar cakupannya cukup luas dan beragam, bukan hanya dalam hal menyampaikan petuwah-petuwah agama di mimbar-mimbar masjid, menjalankan misi kemanusiaan membantu kaum dhuafa dan korban bencana alam, akan tetapi yang paling penting adalah menguasai politik Islam. Demikian juga dengan nahi munkar bukan hanya melarang orang berjudi, prostitusi, dan minum-minuman keras, tetapi ia termasuk melarang umat Islam

memilih pemimpin di luar Islam dan orang-orang yang tidak pernah peduli dengan Islam. Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy menuturkan, “Lapangan dakwah FPI tidak sempit, ia amat luas sampai ke persoalan politik kenegaraan.” Lebih lanjut ditegaskan, “Melarang umat Islam memilih pemimpin kafir atau anti penerapan syariat Islam jauh lebih besar bentuk dakwah nahi munkarnya.”¹⁰³ Lebih lanjut Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy menjelaskan bahwa hanya dengan menguasai pemerintahan, Islam akan jaya dan hebat.

“Tidak akan pernah hebat Islam apabila politik masih dikuasai kalangan luar Islam. Dengan berpolitik dan menguasai pemerintahan, maka semua hal terkait keadilan, kesejahteraan dan yang paling penting adalah eksistensi Islam akan terjaga, dan keamanan dalam makna sesungguhnya akan dirasakan oleh orang Islam. Tanpa menguasai politik jangan bermimpi kepentingan Islam akan aman dan selamat. Lihat di berbagai kawasan yang minoritas Islam, mereka di sana menjadi mangsa pihak lain. Di Indonesia saja yang mayoritas Islam, tetapi karena bukan sistem Islam, umat Islam terkesan sebagai tamu di negerinya.”¹⁰⁴

Tgk. Hambalisyah menyatakan bahwa ideologi FPI sesuai dengan sistem Islam, yaitu sesuai dengan firman Allah dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 4, yaitu amar makruf-nahi munkar. Skop perjuangan FPI dalam berbagai perspektif sesuai dengan ideologi Islam, salah satunya adalah menguasai politik.

“Semua orang Islam harus berkecimpung dalam dunia politik. Tidak boleh apatis dengan politik. Apabila kita tidak peduli dengan politik, maka orang-orang di luar Islam akan menguasai panggung politik. Apabila ini terjadi, tentu yang sangat dirugikan adalah umat Islam dan misi Islam itu sendiri.”¹⁰⁵

¹⁰³ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy pada tanggal 15 Juni 2021.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy pada tanggal 15 Juni 2021.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Tgk. Hambalisyah pada tanggal 13 Juni 2021.

Mantan Sekretaris FPI Aceh Singkil, Azwar mengungkapkan bahwa secara pribadi banyak anggota FPI terlibat dalam politik praktis, tetapi bukan mengatasnamakan organisasinya.

“Kalau secara personal ada, kalau secara organisasi belum ada. Di Aceh banyak anggota FPI terlibat dalam politik praktis.”¹⁰⁶

Kemudian Tgk. Hambalisyah menambahkan bahwa perjuangan FPI dengan cita-cita (ideologi) rakyat Aceh tidak ada perbedaan. Baginya, salah satu bentuk keistimewaan Aceh adalah penerapan syariat Islam secara kaffah. Demikian juga FPI ingin menerapkan syariat Islam dalam semua sektor kehidupan.

“Kalau kita lihat ya sama menjadikan Aceh ini menjadi negeri yang madani, negeri yang damai, negeri yang betul-betul berdiri di atas kakinya sendiri. Kita tidak mau didikte, diatur oleh orang-orang yang tidak tau kekhususan Aceh.”¹⁰⁷

Tgk. Yusuf Al-Qardhawy menuturkan bahwa hampir semua parpol ada orang-orang FPI meskipun bukan partai yang mengatasnamakan Islam, seperti Hanura, Golkar, Gerindra, dan sebagainya. Ditambahkan, sejak suksesi pilkada Jakarta tahun 2017, FPI sudah secara terang-terangan terlibat dalam dunia politik praktis. Demikian juga ketika pilpres tahun 2019, FPI secara *all out* mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

“Kini FPI tidak lagi main politik sembunyi-sembunyi, bukan masanya lagi.

Sejak pilgub Jakarta tahun 2017 FPI berada di garda terdepan mendukung

¹⁰⁶ Wawancara dengan Teungku Azwar pada tanggal 23 Juni 2021.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Tgk. Hambalisyah pada tanggal 13 Juni 2021.

secara penuh Anis Baswedan. Begitu juga pada masa pilpres 2019, FPI berkampanye dan mendukung Prabowo sebagai presiden RI.”¹⁰⁸

Bapak Bustaman Usman mengatakan banyak pengurus FPI masuk dalam politik praktis, seperti masuk dalam PA (Partai Aceh), PNA (Partai Nanggroe Aceh), dan PDA (Partai Daerah Aceh) dan menjadi tim sukses pada masa pesta demokrasi. Masuknya FPI dalam ranah merupakan suatu kemajuan dalam memperjuangkan Islam *by system*.

“Laskar-laskar FPI itu masuk dalam perpolitikan di Aceh seperti dalam pesta demokrasi kemarin, ada sebagian sesepuh FPI itu masuk dalam partai lokal dan partai-partai lain. Itu merupakan bagian daripada kemajuan orang-orang FPI bahwa politik itu tidak bisa dipisahkan dengan agama.”¹⁰⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa lapangan dakwah FPI bukan hanya persoalan agama *an sich* atau lapangan ibadah *mahdhah* semata, akan tetapi cakupannya termasuk dalam hal persoalan politik yang termasuk ke dalam ibadah *ghairu mahdhah*. Bagi FPI, persoalan politik atau kekuasaan menempati rangking tertinggi karena agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Tgk. Yusuf Al-Qardhawy mengemukakan:

“Bagi FPI politik dan agama ibarat ikan dengan air yang mustahil dipisahkan. Apabila umat Islam melek atau lupa akan politik, maka akan rugi besar. Akan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 5 Februari 2021.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Bustamam Usman pada tanggal 30 Juni 2021.

sulit menjaga agama apabila politik terutama politik kekuasaan ternafikan. Umat Islam yang yakin dengan akhiratnya harus terjun dalam dunia politik.”¹¹⁰

Pernyataan Tgk Yusuf Al-Qardhawiy di atas senada apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Menurut Imam Al-Ghazali, “Dunia adalah ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah tiang, sementara penguasa adalah penjaga. Bangunan tanpa tiang akan rubuh, dan apa yang tidak dijaga akan hilang. Keteraturan dan kedisiplinan tidak akan terwujud kecuali dengan penguasa.”¹¹¹ Kemudian Imam Al-Ghazali juga menyebut di samping anjuran mendirikan negara, agama juga menuntun manusia untuk membentuk lembaga pemerintahan supaya dapat mengelolanya dan menjaganya serta menjalankannya.¹¹² Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa agama tidak akan tegak tanpa ada pemimpin (pemerintahan Islam).¹¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas disimpulkan bahwa keinginan FPI untuk membentuk sistem pemerintahan secara konstitusional melalui jalan (*thariqah*) amar makruf-nahi munkar adalah sesuai dengan konsep pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. FPI terus berupaya agar di Indonesia terwujud sebuah sistem pemerintahan yang tidak menafikan hukum Tuhan berlaku sesuai amanah

¹¹⁰ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawiy pada tanggal 5 Juni 2021.

¹¹¹ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 44.

¹¹² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31-33.

¹¹³ Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004), hal. 43.

Sila Pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Sila Pertama dari Pancasila tersebut merupakan pandangan dasar bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kebangsaan bangsa Indonesia.¹¹⁴

Menyangkut gerakan dakwah FPI di Aceh, maka dapat dilihat ideologinya dikembangkan dengan berbagai bentuk, mulai merangkul ulama-ulama dayah, akademisi, aktivis Islam, bahkan terlibat langsung sebagai tim sukses para calon legislatif dan calon kepala daerah mulai tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, bahkan terlibat langsung pula dalam suksesi pemilihan presiden/wakil presiden.

“Sejak pendiriannya, FPI selalu terlibat dalam suksesi perpolitikan di negeri ini. Pada tahun 2017 semua orang tahu FPI mati-matian memperjuangkan Anis Baswedan menjadi Gubernur DKI. FPI dengan segenap kekuatan menghadang Ahok (Basuki Purnama) agar tidak menjadi orang nomor satu di Jakarta.” Pada pemilihan presiden tahun 2019, FPI terlibat aktif mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjadi Presiden RI, tetapi Allah takdirkan lain hasilnya.”¹¹⁵

Dalam kontestasi politik lokal, FPI sejak awal pendiriannya di Aceh sudah terlihat terlibat dalam politik praktis, baik sebagai tim kampanye maupun ikut mencalonkan diri sebagai legislator di berbagai tingkatan. Pada pemilu 2019 silam, untuk DPD (Dewan Perwakilan Daerah), FPI Aceh mendukung Fakhurrazi, untuk DPRA tertera namanya beberapa orang, yang terpilih seperti Fakhurrazi dari PPP. Demikian juga untuk kepala daerah, beberapa kabupaten/kota FPI memberi dukungan politik untuk kandidat-kandidat yang telah

¹¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 55.

¹¹⁵ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 5 Juni 2021.

membuat komitmen politik. Ada di Aceh Utara, Aceh Besar, Banda Aceh, Naganraya, Pidie, Bireuen, dan lain-lain.¹¹⁶

Secara konkret dapat disimpulkan bahwa bentuk perjuangan ideologi FPI dalam politik lokal di Aceh cukup beragam, mulai dari advokasi penegakan syariat Islam secara kaffah hingga terlibat dalam politik praktis. Tujuan terjun dalam dunia politik praktis pun dalam rangka memperkuat perjuangan penegakan syariat Islam di Aceh. FPI cukup sering mengadakan aksi dalam berbagai bentuk terutama menyangkut isu-isu agama. Aksi dilakukan bukan hanya di Ibukota Provinsi Aceh, tetapi hampir di semua kabupaten/kota yang sudah ada cabang FPI.

Tgk. Hambalisyah menegaskan dalam dalam ranah politik di Aceh, FPI konsisten memperjuangkan syariat Islam di Aceh lebih luas (kaffah), bukan hanya dalam bidang perkawinan, ibadah *mahdhah* seperti puasa, salat, dan sebagainya. Yang paling penting adalah berpolitik secara syariah, ini artinya bahwa umat Islam harus menguasai politik. Dalam hal ini ia mengutip firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 208 ayat, “masuklah kalian dalam Islam secara kaffah”.

“Memilih sosok pemimpin itu juga ala syariah, berpolitik ala syariah, jadi supaya kaffah, jangan nanti seolah-olahnya kalau sudah berbahasa politik bukan ranah ustaz, bukan ranahnya ulama, itu salah!”¹¹⁷

Lebih lanjut Tgk. Hambalisyah menambahkan bahwa bentuk perjuangan FPI di Aceh adalah konsisten memperjuangkan syariat Islam dalam multiperspektif,

¹¹⁶ Wawancara dengan Tgk. Abdul Wahid pada tanggal 6 Februari 2021.

¹¹⁷ Wawancara dengan Tgk. Hambalisyah pada tanggal 13 Juni 2021.

salah satunya adalah memilih pemimpin secara bersyariat. Peran FPI dalam hal ini adalah mendorong semua pihak bahkan terlibat langsung di dalam sistem memperjuangkan *afrad* kehidupan ini semua dengan sistem politik Islam.

“Sebenarnya kita FPI secara langsung FPI tidak boleh terlibat di partai politik, secara langsung membawa nama FPI, tetapi kami melihat sejak pencalonan Anis Baswedan dan Prabowo sudah terlihat secara terang-terangan. Sejak parlok hadir di Aceh belum bisa memberi warna, masih berkiblat ke nasional. FPI akan terus mendorong agar ulama Aceh terjun dalam dunia politik praktis. SDM ulama Aceh tidak kalah juga dengan mereka yang mengaku politisi-politisi handal.”¹¹⁸

Tgk. Hambalisyah mengungkapkan bahwa “Aksi FPI di berbagai kabupaten/kota di Aceh tidak ada tujuan pragmatis samasekali. Gerakan FPI murni untuk menegakkan syariat Islam. Kami tidak dididik untuk mengejar kepentingan duniawi, tapi kami murni hanya mencari ridha Allah. Aceh telah diberikan otoritas secara hukum dan politik menjalankan syariat Islam secara *kaffah*, tapi masih ada penguasa di Negeri Serambi Mekkah ini yang kurang serius dengan syariat Islam.”¹¹⁹

Tgk. Hambalisyah mengemukakan bahwa bentuk perjuangan ideologi FPI di Aceh bermacam-macam tergantung kondisi dan situasi, namun muaranya adalah tegaknya syariat Islam secara *kaffah* di persada Indonesia. Tgk. Hambalisyah menambahkan bahwa FPI akan senantiasa berada di garda terdepan di Aceh memperjuangkan tegaknya hukum Islam sesuai *manhaj nubuawah*.

¹¹⁸ Wawancara dengan Tgk. Hambalisyah pada tanggal 13 Juni 2021.

¹¹⁹ Wawancara dengan Tgk. Hambalisyah pada tanggal 13 Juni 2021.

“Kami akan tetap berjuang hingga titik darah penghabisan agar syariat Islam benar-benar wujud di Nusantara ini yang sesuai konsep Tuhan dan Nabi-Nya, namun sikon tetap menjadi perhatian kami. Berbagai bentuk perjuangan penegakan syariat Islam akan terus dilakukan kendati nyawa menjadi taruhan.”¹²⁰

Bapak Bustaman Usman mengatakan bahwa contoh ideologi FPI di Aceh sejalan dengan orientasi ulama-ulama Aceh yakni keyakinan dalam beragama, memiliki fanatisme yang kuat dengan ajaran agamanya dan memegang teguh pada Alquran dan Alhadis. Ideologi yang terpenting dalam tubuh FPI adalah dogma *khairunnas anfa'u linnas* (sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain).

“Bentuk ideologi FPI di Aceh, keyakinan dalam beragama, fanatisme yang luar biasa, mereka berpegang teguh pada Alquran dan Alhadis kemudian mengikuti daripada ijmak para ulama, yang intinya adalah mereka selalu menebarkan kedamaian karena ada sisi yang luar biasa dalam tubuh FPI itu sendiri adalah *khairunnas anfa'u linnas*, sebaik-baik kamu bagaimana kamu bisa menjadi manfaat bagi orang lain, jadi sangat luar biasa ketika terjadi gempa dan gelombang tsunami FPI tampil di garda terdepan untuk mengambil mayat-mayat yang berserakan mengevakuasi dan sebagainya, ini suatu kinerja yang sangat kita apresiasi dalam hal amar makruf-nahi munkar”¹²¹

Lebih lanjut Bapak Bustamam Usman menjelaskan, ia bangga bisa berjuang bersama-sama dengan FPI untuk memperjuang tegaknya hukum Islam di Aceh. Ia juga bangga rakyat Aceh dalam koalisi ormas-ormas Islam mempercayai orang FPI

¹²⁰ Wawancara dengan Tgk. Hambalisyah pada tanggal 13 Juni 2021.

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Bustamam Usman, MA pada tanggal 30 Juni 2021.

sebagai ketuanya. Dalam koalisi ormas Islam tersebut tidak kurang 30 ormas bergabung di dalamnya.

“Suatu kebanggaan menjadi keluarga besar FPI untuk berjuang syariat Islam. Rakyat Aceh sadar betul FPI adalah ormas lurus, tulus, dan ikhlas dalam menegakkan hukum Allah sehingga mereka memilih Ketua FPI Banda Aceh sebagai ketua aliansi ormas Islam yang bergabung lebih 30 ormas dan okp.”¹²²

Mantan aktivis KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), Cut Hamina mengatakan bahwa sejak ia mengenal FPI semasa kuliah sudah tertarik, namun pada saat itu belum bisa bergabung karena kesibukannya. Meskipun demikian, kendati tidak pernah tercatat sebagai anggota apalagi menjadi pengurus FPI, ia mengamati hari per hari kegiatan dan sepakterjang FPI. Menurutnya FPI memiliki ideologi yang tidak ada perbedaan sedikitpun yang dicita-citakan rakyat Aceh, yaitu penerapan syariat Islam secara kaffah.

“Saya lihat tidak ada perbedaan ideologi FPI dengan cita-cita atau ideologi rakyat Aceh sejak awal secara umum, yaitu demi tegaknya sistem Islam dalam segala dimensi kehidupan.”

Selanjutnya menurut Cut Hamina yang saat ini berprofesi sebagai salah satu guru (wakil kepala sekolah) di Kota Banda Aceh menerangkan:

“FPI memiliki peran besar di Aceh sejak mereka hadir di sini. Pada saat tsunami tahun 2004 FPI mengevakuasi mayat-mayat rakyat Aceh, bahkan Habib Rizieq dan istrinya juga ikut evakuasi mayit. Kemudian setelah tsunami, mereka ikut sama-sama membangun Aceh, bahkan sampai saat ini meskipun

¹²² Wawancara dengan Bapak Bustamam Usman, MA pada tanggal 30 Juni 2021.

FPI sudah dibekukan, mereka masih aktif menggalang dana untuk bencana di mana-mana sampai menggalang dana untuk bangsa Palestina, Rohingya dan lain-lain. Dalam dunia politik mereka secara militan mendukung caleg-caleg Islam garis lurus, bukan caleg liberal dan sekuler. Begitu juga FPI mendukung calon-calon kepala daerah yang memiliki ideologi yang sama dengan mereka. Intinya peran FPI di Aceh harus diakui sangat besar.”¹²³

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi FPI sejalan dengan cita-cita rakyat Aceh pada umumnya, yaitu tegaknya syariat Islam secara kaffah. Kemudian FPI memiliki pengaruh besar di Aceh dan didukung ulama-ulama dayah, bahkan tidak sedikit pimpinan dayah adalah fungsionaris FPI dan beberapa pengurus inti FPI lainnya merupakan akademisi (dosen) dan pengusaha besar di Aceh. Peran FPI di Aceh cukup signifikan, baik terlibat dalam politik praktis seperti menjadi anggota legislatif maupun menjadi tim sukses pada kontestasi-kontestasi pemilu dan pilkada. Apabila terjadi bencana, ormas FPI berada di garda terdepan mengumpulkan (menggalang) bantuan dan menyalurkannya kepada yang berhak. Jika ada aksi demonstrasi, massa FPI jauh lebih banyak dibandingkan dengan massa ormas-ormas lainnya, bahkan koalisi ormas Islam di Aceh, ketuanya berasal dari unsur FPI.

4.5 Tantangan dan Peluang Politik FPI di Aceh

Dalam menjalankan sebuah roda organisasi dan peluang dan tantangan suatu keniscayaan. Sejak awal hadir di Aceh sudah tampak tantangan yang dihadapi FPI, namun tantangan-tantangan itu mampu dilalui dengan baik. Ada beberapa tantangan besar dalam membangun ideology FPI di Aceh, antara lain:

¹²³ Wawancara dengan Cut Hamina pada tanggal 27 Juni 2021.

1. Dituduh ormas bentuk militer (TNI)

Pada awal FPI diperkenalkan kepada masyarakat Aceh dihembuskan isu oleh pihak-pihak tertentu bahwa FPI memiliki keterkaitan dengan Wiranto. Wiranto merupakan mantan Panglima TNI dan Menhankam Pangab yang pernah melontarkan kata-kata yang menyakitkan rakyat Aceh, yaitu “Kami tidak butuh orang Aceh, yang kami butuhkan tanah Aceh.”¹²⁴ Dalam “Mengenal Front Pembela” Yusuf Al-Qardhawiy mengemukakan, “Kata-kata Wiranto tersebut hingga kini masih membekas di hati masyarakat Aceh. Itu sebabnya orang-orang yang tidak senang dengan FPI mengait-ngaitkan FPI dengan Wiranto dengan tujuan agar FPI tidak diterima masyarakat Aceh.”¹²⁵

2. Tantangan lain dalam mewujudkan ideologi FPI di Aceh adalah dituduh sebagai ormas radikal dan mendukung gerakan terorisme.¹²⁶
3. Kemudian dituduh juga berpaham Wahabi dan Syiah. Tujuan menghebus isu ini adalah agar ulama dayah di Aceh yang dikenal anti Wahabi tidak membentengi dukungan kepada FPI untuk bisa eksis di Aceh.¹²⁷

Tiga tantangan besar di atas adalah dihembuskan pada awal-awal FPI ingin dibentuk di Aceh. Kemudian pasca FPI berdiri secara resmi tahun 2008, secara umum

¹²⁴ Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, *Mengenal Front Pembela Islam....Op.Cit.*, hal. 34.

¹²⁵ Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, *Ibid.*, hal. 34.

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 41

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 41.

tidak ada tantangan berarti, bahkan sebaliknya ramai-ramai ulama dayah dan tokoh masyarakat mendukung FPI.¹²⁸

“Sejauh yang saya tahu tidak ada tantangan berarti setelah kita resmi terbentuk tahun 2008. Bahkan sejauh yang saya ketahui, banyak sekali ulama-ulama dayah, tokoh masyarakat, pengusaha yang mendukung dan bergabung dengan FPI.”¹²⁹

Adapun peluang FPI dalam menyampaikan ideologinya di Aceh cukup banyak. Hal ini terlihat misalnya begitu antusias masyarakat Aceh hingga ulama-ulama besar dayah, bahkan akademisi termasuk mantan kombatan mendukung FPI.

“Banyak sekali ulama kharismatik Aceh menjadi pengurus FPI Aceh. Selain itu ada juga pengusaha, dosen, mantan kombatan GAM, dan lain-lain.”¹³⁰

Dalam buku “Mengenal Front Pembela Islam” disebutkan beberapa ulama dayah (kharismatik) Aceh yang menjadi pengurus FPI Aceh periode 2008 – 2012, antara lain:

1. Abuya Jamaluddin Waly (pimpinan Dayah Asasun Najah, Aceh Besar);
2. Tgk. Bulqaini Tanjongan (pimpinan Dayah Al-Ishlah Al-Aziziyah Banda Aceh);
3. Tgk. H. Muhammad Ismi, Lc (Abu Madinah; pimpinan Dayah Babun Najah Banda Aceh);
4. Tgk. Muslim At-Thahiry (pimpinan Dayah Darul Mujahidin Lhokseumawe);
5. Tgk. Lutfhi Arongan (Ayah Panti, pimpinan Dayah Harapan Ummat Bireuen);
6. Dll.¹³¹

¹²⁸ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 10 Juli 2021.

¹²⁹ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 10 Juli 2021.

¹³⁰ Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 10 Juli 2021.

¹³¹ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Mengenal Front Pembela Islam,Op.Cit.*, hal. 47-48.

Selain ulama dayah, terdapat beberapa dosen (akademisi UIN Ar-Raniry dan Unsyiah yang menjadi pengurus FPI Aceh periode 2008-2022, antara lain ada nama Prof. Dr. Mustanir, M.Sc, (Unsyiah), Dr. Gunawan Adnan, MA (UIN Ar-Raniry), Tarmizi Daud, MA (dosen UIN Ar-Raniry), dan lain-lain. Ada juga mantan kombatan GAM, seperti Tgk. Ilyas Puteh, Tgk. Mukhtar Kandang, Tgk. Boyhaki Siren, dan lain-lain.¹³²

Setelah FPI didukung oleh ulama dayah, akademisi, mantan kombatan GAM, dan lain-lain di Aceh menjadi modal besar mengembangkan ideologinya ke seluruh Aceh. Maka oleh karena itu, FPI merupakan ormas terbesar di Aceh yang anggotanya mencapai 60 ribu orang. Sebelum FPI dibubarkan oleh pemerintah pusat, semua kalangan dekat dengan FPI. FPI menjadi ormas yang dicintai oleh masyarakat, bahkan ketika Habib Rizieq Syihab datang ke Aceh tahun 2017, puluhan ribu pendatang menghadiri ceramah Imam Besar Umat Islam tersebut.¹³³

¹³² Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Ibid.*, hal. 48-49.

¹³³ Disampaikan oleh Tgk. Yusuf Al-Qardhawy dalam wawancara tanggal 10 Juli 2021.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab-I sampai Bab-IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. FPI telah berhasil menjadi bagian masyarakat Aceh karena kesamaan pandangan dan ideologi dalam memperjuangkan dan memperkuat syariat Islam di Aceh. *Grand issue* yang menjadikan FPI diterima oleh masyarakat Aceh adalah mengenai syariat Islam. Keluhaian FPI menarik dukungan ulama, akademisi, pengusaha dan elit partai lokal di Aceh untuk memperjuangkan dan memperkuat isu-isu syariat Islam sehingga ideologi FPI menjadi ideologi bersama masyarakat Aceh. Ideologi FPI yang diperjuangkan dalam ranah politik di Aceh adalah memperkuat terimplementasinya syariat Islam secara kaffah. Selain itu, kehadiran FPI di Aceh sesuai dengan '*koor*' keistimewaan Aceh sehingga memudahkan ideologinya diterima oleh masyarakat. Demikian juga dengan perjuangan politik lokal Aceh lainnya, seperti bendera Aceh, kekhususan Aceh, dan sebagainya, FPI secara terang-terangan mendukung hal tersebut baik disuarakan melalui press release ke media massa maupun bentuk aksi demonstrasi yang dilakukan.

2. Ideologi FPI sejalan dengan cita-cita rakyat Aceh pada umumnya, yaitu tegaknya syariat Islam secara kaffah. Kemudian FPI memiliki pengaruh besar di Aceh dan didukung ulama-ulama dayah, bahkan tidak sedikit pimpinan dayah adalah fungsionaris FPI dan beberapa pengurus inti FPI lainnya merupakan akademisi (dosen) dan pengusaha besar di Aceh. Peran FPI di Aceh cukup signifikan, baik terlibat dalam politik praktis seperti menjadi anggota legislatif maupun menjadi tim sukses pada kontestasi-kontestasi pemilu dan pilkada. Apabila terjadi bencana, ormas FPI berada di garda terdepan mengumpulkan (menggalang) bantuan dan menyalurkannya kepada yang berhak. Jika ada aksi demonstrasi, massa FPI jauh lebih banyak dibandingkan dengan massa ormas-ormas lainnya, bahkan koalisi ormas Islam di Aceh, ketuanya berasal dari unsur FPI.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pengurus dan anggota FPI di Aceh agar terus konsisten memperjuangkan syariat Islam agar dapat berlaku di semua lini. FPI harus menyiapkan SDM yang handal dalam melaksanakan ideologinya.
2. Diharapkan perjuangan penegakan syariat Islam yang dilakukan FPI dapat dilakukan melalui sistem yang tersedia di NKRI, yaitu melalui jalur politik, tidak lagi menggunakan pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada kekerasan.

3. Agar dapat memudahkan memperjuangkan syariat Islam, diharapkan FPI dapat membentuk partai politik sendiri untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Teks

- A'an Efendi, dkk, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : CV Jejak, 2018.
- Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Abd. Halim, *Politik Lokal: Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya*, Yogyakarta: LP2B, 2014.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Malang, UIN-Maliki Press, 2008.
- Khairul Umam, A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara 2013.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, (terj-Fadli Bahri), cet-2, Bekasi: Darul Falah, 2006.
- Jhon B. Thompson, *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*, (terj: Haqqul Yaqin), Jogjakarta: IRCISoD, 1984.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Muhammad Habib Rizieq Syihab, *Dialog FPI Amar Makruf Nahi Munkar: Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Maksiat di Indonesia*, Cet.ke-2, Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2008.

- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasaah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya: 2009.
- Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Salman bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (terj: Ummu Udhma' Azmi), Solo: Pustaka Mantiq.
- Soerjanto Poespowardojo, *Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, dalam Alfian & Oetomo Oesman, eds, "Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara", Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syaikh An-Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Munir*, Cet-2, Jilid-II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Mengenal Front Pembela Islam: Sejarah, Tujuan, dan Gerakan (Analisis Perspektif Pancasila, UUD 1945, dan Teori Hukum)*, Banda Aceh: Pena, 2018.
- Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *MoU Helsinki RI-GAM menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*, Banda Aceh: Bandar Publising, 2015.

2. Jurnal/Skripsi/Tesis/Desertasi.dll

- Ahmad Mubalig, "Relasi Bahasa dan Ideologi", *Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2010 – ISSN 1693-4725.
- Ari Febriansyah Ismail, Skripsi denga judul: "Konstruksi Gerakan Front Pembela Islam di Kota Makasar", Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Makasar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2016.
- Ponco Wibowo, Skripsi dengan judul: "Politik dan Dakwah dalam Pandangan Fungsionaris DPW FPI Kota Bandar Lampung", Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Pemikiran Politik Islam, Riau: Universitas Raden Intan, 2017.

Ambiro Puji Asmaroini, “Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisas”, JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2, Januari 2017 E-ISSN 2527-7057, P-ISSN 2545-2683.

3. Data Internet

Ari Welianto, “Ideologi, Sejarah, dan Macamnya”, diakses melalui: <https://www.kompas.com> pada tanggal 21 September 2020.

M. Kausar Bailusy, “Dinamika Politik Lokal”. Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I Makassar 2000, hal. 402. Diakses melalui: <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/2.24.pdf> pada tanggal 22 September 2020.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-politik-lokal/121114>, diakses pada tanggal 22 September 2020.

<https://nasional.tempo.co/read/383964/rentetan-aksi-fpi-dari-masa-ke-masa/full&view=ok>, diakses tanggal 12 Juni 2021,

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/01/07511261/front-pembela-islam-dibubarkan-muncul-fpi-wajah-baru?page=all>, diakses tanggal 2 Agustus 2021.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20201230/15/1336916/fpi-dibubarkan-isi-lengkap-surat-keputusan-bersama-menteri-jaksa-agung-kapolri-dan-kepala-bnpt>, diakses tanggal 2 Agustus 2021.

4. Wawancara/Responden

Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhawy pada tanggal 5 Juni 2021.

Wawancara dengan Teungku Azwar pada tanggal 30 Juni 2021.

Wawancara dengan Bapak Bustamam Usman, MA pada tanggal 29 Juni 2021.

Wawancara dengan Tgk. Ahmad Tajuddin (Aby Lampisang) pada tanggal 30 Juni 2021.

Wawancara dengan Tgk. Hambalisyah pada tanggal 13 Juni 2021.

Wawancara dengan Tgk. Abdul Wahid pada tanggal 6 Februari 2021.

Wawancara dengan Azhari pada tanggal 14 Juni 2021.

Wawancara dengan Teuku Raja Sadzali pada tanggal 10 Juni 2021.

Wawancara dengan Tgk. Abubakar, SE pada tanggal 20 Juni 2021.

Wawancara dengan Cut Hamina pada tanggal 27 Juni 2021.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1850/Un.08/FISIP/Kp.07.6/10/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 11 September 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara
 1. Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A. Sebagai pembimbing pertama
 2. Aklima, S.Fil.I., MA Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Devin Muranis Alfandi
 NIM : 160801075
 Program Studi : Ilmu Politik
 Judul : Peran Front Pembela Islam (FPI) Dalam Ranah Politik Di Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Tanggal : 20 Oktober 2020

Rektor

Krisna Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

GALERY WAWANCARA DENGAN RESPONDEN/INFORMAN



Wawancara dengan Tgk.Ahmad Tajuddin (Aby Lampisang) pada tanggal 25 Juni 2021



Wawancara dengan Tgk. Isramudin pada tanggal 17 Juni 2021.



Wawancara dengan Bapak Bustamam Usman, MA pada tanggal 29 Juni 2021



Wawancara dengan Tgk. Abubakar, SE pada tanggal 20 Juni 2021.



Wawancara dengan T. Raja Sadzali, ST pada tanggal 11 Juni 2021.



Wawancara dengan Tgk. Hambalisyah, S,Pd.I pada tanggal 13 Juni 2021.



Wawancara dengan Tgk. Azwar Ramnur, MA pada tanggal 23 Juni 2021.



Wawancara dengan Tgk. Azhari, SHI pada tanggal 14 Juni 2021.



Wawancara dengan Ibu Cut Hamina, S.Pd., S.Pd.I pada tanggal 27 Juni 2021.



Wawancara dengan Tgk. Yusuf Al-Qardhaw, SHL., MH pada tanggal 5 Juni 2021.